



**PEMBANGUNAN TNI AU DIHADAPKAN DENGAN  
PERKEMBANGAN GEOPOLITIK KAWASAN**

**TESIS**

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Pertahanan  
Universitas Pertahanan Indonesia**

**Oleh**

**A. GUSTAF BRUGMAN**

**Nomor Pokok Mahasiswa: 120090101035**

**Program Studi Strategi Perang Semesta  
Sekolah Strategi Perang Semesta  
Universitas Pertahanan Indonesia**

**UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA**

**2010**

## ABSTRAK

Nama : A Gustaf Brugman  
Program Studi : Sekolah Strategi Perang Semesta.  
Judul : Pembangunan TNI AU di Hadapkan Dengan Perkembangan Geopolitik Kawasan.

Tesis ini membahas perubahan geopolitik kawasan Asia Tenggara pada kurun waktu 2005-2009 telah membuat negara-negara kawasan membangun sebuah Angkatan Bersenjata yang kuat. Pembangunan kekuatan tersebut banyak dipengaruhi oleh negara-negara besar terutama China. Perubahan geopolitik yang sedemikian cepat tersebut seharusnya dikuti dan diantisipasi oleh Indonesia karena memiliki letak yang strategis dikawasan ini. Menghadapi perubahan tersebut sudah selayaknya Indonesia membangun TNI yang kuat terutama TNI AU karena alutsista TNI AU mampu digerakan secara dini dan jauh diluar daerah teritorial untuk menangkal setiap ancaman sebagai akibat perubahan geopolitik kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kurun waktu tersebut, pembangunan kekuatan TNI AU ternyata tidak mampu menghadapi ancaman jika perubahan geopolitik kawasan berbalik mengancam negara Indonesia.

Kata kunci :  
Geography, Strategy dan National Power.

## ABSTRACT

Name : A Gustaf Brugman  
Program : Sekolah Strategi Perang Semesta.  
Title : Indonesian Air Force development facing to regional geopolitics progress

This thesis talks about the transformation of regional geopolitics in South East Asia in the periode of 2005-2009 that encouraged countries in this circumstance to build a powerful armed force. Big countries, especially China, really had influenced the transformation progress. Indonesia, which is located in this strategic position, should give sharp attention to this rapid growth of the geopolitics transformation, and prepare some anticipation action as well. It is supposed that Indonesia build its armed forces, particularly Air Force, because it has primary weapon system (alutsista) that can be utilized quickly, and even to keep any threat under control far outside its teritory. However, researches show that in that period, Indonesian Air Force had inadequate power to handle the possible threat if the geopolitics transformation turned against Indonesia.

Keywords :  
Geography, Strategy and National Power.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A Gustaf Brugman.

NPM : 120090101035.

Program Studi : Sekolah Strategy Perang Semesta.

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PEMBANGUNAN TNI-AU DIHADAPKAN DENGAN PERKEMBANGAN  
GEOPOLITIK KAWASAN”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salemba, Jakarta

Pada tanggal : Agustus 2010

A Gustaf Brugman

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : A Gustaf Brugman.

NPM : 120090101035

Tanda Tangan :

Tanggal :

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Pertahanan pada Sekolah Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

(1) Prof Sri Hartati D Reksodipuro Suradijono, Ph.d, selaku dosen pembimbing yang dengan amat sabar telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan serta tak henti-hentinya membangkitkan semangat saya untuk menyelesaikan Tesis ini.

(2) Marsma TNI Dr. Suprpto selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan kepada saya sampai dengan Tesis ini selesai.

(3) Isteri dan kedua putra saya tercinta yang dengan sabar ikut berkorban untuk mendukung saya selama mengikuti pendidikan di Unhan.

(4) Mabasau terutama jajaran Srenau teristimewa Kolonel Nav Azman Yunus dan Kolonel Nav M Safei yang telah bersedia berbagi informasi untuk melengkapi tulisan Tesis ini.

(5) Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Pertahanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penyusunan Tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Salemba      Agustus 2010

A Gustaf Brugman

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
LAMPIRAN .....	ix
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang. ....	1
1.2. Geopolitik. ....	4
1.2.1 Geopolitik Indonesia .....	5
1.2.2 Geopolitik Kawasan Asia Tenggara .....	7
1.3 Kondisi Alut Sista TNI AU saat ini .....	7
1.4 Identifikasi Masalah .....	9
1.4.1 Pembatasan Masalah .....	12
1.5 Perumusan Masalah .....	13
1.5.1 Pertanyaan Penelitian .....	13
1.6 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
<b>2. KERANGKA TEORI .....</b>	<b>14</b>
2.1 Teori Geopolitik. ....	14
2.2 Teori Realis HI dari Morgenthau .....	15
2.3 Teori Kebijakan Keamanan Nasional .....	17
2.4 Teori Air Power .....	18
2.4.1 General Guilio Douhet .....	19
2.4.2 Kekuatan Udara Sebagai Instrument Nasional .....	20
2.4.3 Membangun Kekuatan Udara Suatu Perspektif Geopolitik .....	21
<b>3. METODA PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	23
3.2 Kehadiran Peneliti .....	24
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
3.4 Sumber Data .....	24
3.5 Prosedur Pengumpulan Data .....	24
3.6 Analisa Data .....	25
3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan .....	25
<b>4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>25</b>
4.1 Geopolitik Kawasan. ....	26
4.1.1 Indonesia .....	26
4.1.2 Malaysia .....	30

4.1.3	Singapura .....	33
4.1.4	Thailand .....	36
4.1.5	Vietnam .....	38
4.1.6	China .....	42
4.1.7	Australia .....	46
4.1.8	Philipina .....	49
4.2	Kebijakan Pertahanan Indonesia .....	51
4.2.1	Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 .....	51
4.2.2	Dukungan Anggaran Pertahanan .....	54
4.3	Pembangunan TNI AU .....	55
4.3.1	Doktrin .....	55
4.3.2	Anggaran .....	56
4.3.3	Kesiapan Pesawat .....	57
4.3.4	Kesiapan Radar Hanud .....	60
4.4	Analisis.....	60
4.4.1	Geopolitik Kawasan .....	61
4.4.2	Anggaran Pertahanan .....	66
4.4.3	Alutsista .....	69
5.	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	71
5.1	Kesimpulan .....	71
5.2	Saran .....	71
	DAFTAR PUSTAKA .....	73

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang.

Runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan berakhirnya era Presiden Soeharto diikuti pula dengan tuntutan sebagian besar masyarakat Indonesia atas penghapusan peran Dwi Fungsi ABRI yang menurut beberapa tokoh masyarakat dianggap menjadi sumber ketidak profesionalan ABRI saat itu. Dwi fungsi dinilai hanya memperkuat sebuah regim yang tidak demokratis dan pada akhirnya meninggalkan fungsi utama ABRI saat itu yaitu sebagai tulang punggung sistem Hankamrata. Menanggapi tuntutan masyarakat tersebut pimpinan ABRI saat itu menggulirkan program Reformasi internal TNI yang pada saat bersamaan proses politik negara menghasilkan pemisahan TNI- Polri sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 (tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia) serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 (tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia). Selanjutnya Pemerintah beserta DPR telah berhasil menetapkan Undang undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang didalamnya menyebutkan arti TNI yang profesional. Pengertian tersebut terdapat dalam pasal 2 alinea d yang tertulis sebagai berikut :

“Tentara Profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut sistem Demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.

Dari pengertian tersebut nampak jelas bahwa untuk mendapatkan TNI yang profesional ternyata tidak hanya menjadi tugas TNI semata melainkan juga tugas pemerintah terutama dalam bidang anggaran pertahanan serta pengadaan

alutsista/persejataan TNI karena pasal tersebut mengamankan TNI yang diperlengkapi dengan baik. Tetapi pasca reformasi belum tampak upaya dan kemauan politik yang signifikan untuk membangun TNI yang profesional. Masih terdapat keraguan dan trauma politik masa lampau di beberapa kalangan masyarakat yang menganggap pembangunan kekuatan TNI yang kuat akan membawa TNI kedalam kancah politik kembali. Selama ini banyak kalangan dari pihak sipil yang menganggap Reformasi didalam tubuh TNI hanyalah masalah politik yang harus ditinggalkan oleh TNI. Masalah profesionalisme sering terlupakan karena upaya untuk membangun kekuatan TNI selalu dicurigai oleh kaum terpelajar dan LSM sebagai upaya kembalinya militer ke ranah politik<sup>1</sup>.

Salah satu angkatan di TNI yang menerima dampak sangat buruk dari kondisi tersebut adalah TNI AU. TNI AU sebagai bagian integral dari TNI sangat berkepentingan dengan definisi pasal 2 UU no 34 tahun 2004 yaitu diperlengkapi secara baik. Sebagai Matra yang sarat dengan perlengkapan yang berbobot teknologi tinggi maka TNI AU memerlukan Alut Sista Udara yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tugas pokok TNI AU menurut pasal 10 UU no 34 tahun 2004 adalah “Menegakkan Hukum dan menjaga keamanan di wilayah yuridiksi Nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diRatifikasi”. Untuk melaksanakan tugas pokok terutama dalam rangka penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah yuridiksi nasional maka diperlukanlah Alutsista Udara yang memadai, baik dari segi jumlah maupun teknologi. Tuntutan kesiapan dan jumlah yang memadai dari Alut Sista menjadi lebih penting ketika di beberapa bagian wilayah negara kita menjadi ajang pelanggaran wilayah baik disengaja maupun tidak disengaja. Insiden Bawean yang terjadi diatas perairan laut Jawa menunjukkan bahwa kemungkinan ancaman bersenjata akibat geopolitik negara kita akan sangat mungkin terjadi. Disamping ancaman pelanggaran wilayah dari negara Super Power yang tidak mengakui UNCLOS’82 negara kita juga masih menyisakan masalah perbatasan dengan negara tetangga dikawasan Asia Tenggara. Ketegangan yang terjadi di Ambalat antara pemerintah RI dengan Malaysia

---

<sup>1</sup> MT Arifin, Sipil Militer Pasca Reformasi. Dalam buku Reformasi TNI Perspektif Baru Hubungan Sipil Militer di Indonesia. LP3ES hal xxxi

memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa lemahnya kesiapan Alut Sista yang diakibatkan tidak adanya kemauan politik untuk membangun TNI AU sesuai kebutuhan geopolitik negara RI telah membuat negara lain menggunakan diplomasi militer (Koehesi Diplomasi) untuk mencoba mengganggu integritas wilayah nasional negara kita. Keterbatasan Alut sista Udara terutama dalam hal patroli udara maritim juga menjadi salah satu alasan mengapa negara kita tidak menjaga perairannya dengan baik yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran wialayah dan pencurian kekayaan alamnya<sup>2</sup>. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, setiap tahun negara kita mengalami kerugian 30 Trilyun Rupiah akibat illegal fishing yang terjadi diseluruh wilayah NKRI<sup>3</sup>. Jumlah yang tidak sedikit bagi sebuah negara yang sedang berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi dimasa lalu dan jumlah tersebut lebih besar dari anggaran untuk TNI AU pada tahun Anggaran 2009. Kebutuhan pembangunan kekuatan TNI AU yang disesuaikan dengan geografi Indonesia masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Sebagai negara kepulauan luas dan berada pada posisi yang strategis, TNI AU sudah sewajarnya dibangun dengan persepsi ancaman yang mungkin timbul dari geopolitik yang berkembang dikawasan tempat tinggalnya. Kebijakan pemerintah dalam hal anggaran pertahanan yang didalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan Alutsista Udara hendaknya tidak menjadi perdebatan dikalangan pengambil kebijakan tentang arti perlunya memiliki kemampuan pertahanan yang proporsional ataukah mendahulukan pembangunan ekonomi karena kondisi geopolitik Indonesia sangat memerlukan TNI khususnya TNI AU yang kuat untuk mengawal tujuan nasional Indonesia.

Menurut Alan Sthehens dalam buku *High Noon Of Air Power*, Angkatan Udara yang tangguh akan menjadi kekuatan yang menentukan didalam pertempuran modern<sup>4</sup>. Menurut Penulis sampai saat ini tidak ada yang menjamin untuk tidak terjadi konflik bersenjata di sebuah kawasan termasuk kawasan Asia Tenggara tempat negara Indonesia berdomisili. Isue Perbatasan, terorisme,

---

<sup>2</sup> Hasjim Djalal: Kekayaan Laut Banyak Dicuri Karena Tidak Dijaga  
[/http://www.kapanlagi.com/h/0000204371.html](http://www.kapanlagi.com/h/0000204371.html)

<sup>3</sup> Aksi Pencurian Ikan, RI Rugi Rp30T Pertahun/<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=42324>

<sup>4</sup> Keajaiban kekuatan Udara, Kumpulan naskah para ahli kekuatan Udara, wing comander Colin Rymer , Kedubes Australia, hal 107.

*Human Trafficking, Merchant of death*, tumpang tindih klaim budaya masih sangat mungkin menjadi sengketa antar negara kawasan yang pada akhirnya melibatkan kekuatan bersenjata. Faktor-faktor tadi menjadikan penyebab terjadinya kondisi aman dan damai dalam hubungan antar negara disebuah kawasan<sup>5</sup>. Krisis Spratly yang terjadi antara China dan negara-negara ASEAN telah membuktikan bahwa untuk menekan pihak lainnya China menghadirkan kekuatan Udara dan Laut dikawasan yang dipersengketakan tersebut<sup>6</sup>. Tidak hanya konflik dengan China, sesama anggota ASEAN masih terdapat juga upaya menyelesaikan masalah perbatasan dengan menggunakan opsi militer. Contoh terakhir adalah perebutan kuil hindu Preah Vihear diperbatasan Thailand dan Kamboja (kedua negara tersebut mayoritas beragama Budha) hampir saja menjadi konflik bersenjata<sup>7</sup>.

1.2. **Geopolitik.** Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Ilmu geopolitik pertama diperkenalkan oleh Frederich Ratzel dan terus dikembangkan oleh Rudolf Kjellen dan menyebutnya menjadi *geographical politic* dan disingkat geopolitik<sup>8</sup>. Menurut Frederich Ratzel batas-batas sebuah negara tidak statis tetapi selalu tumbuh dan berkembang dan dapat mencaplok negara-negara lemah. Untuk mengamankan geopolitik tersebut memerlukan pengamanan batas negara dengan membangun angkatan Perang yang kuat. Salah satu elemen Angkatan Bersenjata yang sangat menentukan jalannya pertempuran sejak Perang Dunia I adalah angkatan udara. Sejak digunakannya kekuatan udara dalam perang Dunia I, konsep tentang penggunaan Air power yang kuat untuk menjaga kedaulatan ataupun pemaksaan kehendak terhadap negara lain makin berkembang. Menurut Douhet, perang masa depan akan dimulai dengan serangan udara untuk membuat shock dan

---

<sup>5</sup> John Garnett, *The Causes of War and Conditions of Peace*, Oxford University Press, 2004

<sup>6</sup> <http://www.suaramerdeka.com/harian/0212/19/int3.htm> 01 Pebruari 2010

<sup>7</sup> <http://www1.voanews.com/indonesian/news/a-32-2010-02-09-voa13-85849282.html> 01 Maret 2010.

<sup>8</sup> <http://frenndw.wordpress.com/2010/04/04/geopolitik-dan-geostrategi-teori-teori-geopolitik/> 10 januari 2010

kemudian membuat musuh menyerah<sup>9</sup>. Dari pernyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa membangun kekuatan udara harus dilihat sebagai upaya sebuah negara berdaulat untuk menghadapi perubahan geopolitik kawasan tempat tinggalnya. Memang benar Angkatan udara merupakan salah satu element militer sebuah negara, tetapi kekuatan udara dapat digunakan secara mandiri untuk memaksa sebuah negara tunduk kepada otoritas Internasional seperti yang digunakan NATO untuk mengakhiri konflik Balkan tahun 1999<sup>10</sup>.

**1.2.1. Geopolitik Indonesia.** Geopolitik Indonesia sesuai dengan arti dasarnya dapat diartikan sebagai kebijakan Nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara Indonesia yang selalu mengadaptasi perkembangan geopolitik kawasan. Tantangan sebagai akibat letak geografis yang strategis tersebut harus senantiasa diperhitungkan antara perkembangan dalam negeri, lingkungan regional dan politik luar negeri Indonesia<sup>11</sup>. Geopolitik Indonesia sering diidentikkan dengan Wawasan Nusantara yang diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Tap. MPR No.IV tahun 1973. Dari pengertian diatas tampak bahwa posisi geografis Indonesia semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Posisi geografis yang strategis tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga memunculkan kerawanan yang salah satunya adalah pelanggaran wilayah. Konflik Ambalat menyadarkan kepada seluruh Rakyat Indonesia bahwa konflik dapat terjadi setiap saat antara Indonesia dengan negara tetangga yang selama ini

---

<sup>9</sup> Moran Daniel, *Imagining Armagedon: Air Power, Strategic Theory and the History of War*, Oxford, hal 37.

<sup>10</sup> Garden Timothy, *Air power theory and practice, Strategy in the Contemporary World*, Oxford hal 154-155.

<sup>11</sup>Bandoro Bantarto, *Hubungan Luar Negeri Indonesia dan strategy Keamanan Nasional*, CSIS, Percetakan Kanisius, 2005.

dianggap sebagai negara serumpun. Disamping konflik perbatasan dengan sesama negara kawasan, luas negara Indonesia juga sering menjadi ajang pelanggaran wilayah udara<sup>12</sup>. Pelanggaran wilayah udara tersebut berupa terbang tidak sesuai jalur penerbangan semestinya maupun terbang lintas tanpa ijin dari pemerintah Indonesia. Sejauh ini pemerintah Indonesia hanya menggunakan jalur Diplomatik untuk melakukan protes kepada negara yang melakukan pelanggaran. Hal ini terjadi karena kesiapan Alutsista TNI AU sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun kesiapannya sehingga tidak mampu menindak para pelanggar tersebut. Pembangunan TNI AU yang proporsional dengan dihadapkan dengan perubahan lingkungan strategis Negara Indonesia sebagai akibat geopolitik Nasional, diharapkan akan mampu menegakan kedaulatan negara di udara terhadap pelanggaran-pelanggaran udara tersebut.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi keterbatasan alut sista TNI AU merupakan kebijakan publik. Menurut Dr Riant Nugroho dalam buku *Public Policy* disebutkan bahwa *Public Policy* adalah segala upaya negara untuk merespon suatu permasalahan di negara tersebut<sup>13</sup>. Dalam hal ini adalah masalah keterbatasan TNI AU dalam melaksanakan tugas pokoknya. Kebijakan Publik negara Indonesia merupakan hasil dari keputusan politik negara sebagai konsekuensi dari negara Demokrasi. Keputusan politik tersebut dapat dilihat dari diterbitkannya piranti lunak baik berupa Undang-undang ataupun kebijakan pemerintah yang dapat menjadi payung hukum untuk pembangunan TNI termasuk TNI AU didalamnya. Karena kebijakan publik merupakan keputusan politik negara, alangkah baiknya jika iklim politik nasional juga tertata dengan harmonis. Pasca Pemilu 2009, negara kita masih disibukan dengan permasalahan politik dalam negeri yang menguras habis energi bangsa ini. Kasus Cicak melawan Buaya dan Kasus Bank Century dikhawatirkan hanya akan memecah belah bangsa sehingga bangsa ini tidak mampu menghasilkan kebijakan Publik yang nyata-nyata memerlukan penanganan segera, seperti membangun TNI yang profesional untuk menghadapi perubahan geopolitik kawasan yang selalu berubah dan dapat menjadi ancaman kedaulatan negara Indonesia.

---

<sup>12</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/1261908405/pelanggaran-wilayah-udara-indonesia>.

<sup>13</sup> Dr Riant Nugroho, *Public Policy*, Pt Elex Media Komputindo, hal 10-14.

**1.2.2 Geopolitik Kawasan Asia Tenggara.** Kawasan Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia telah menjadi salah satu kawasan yang diperebutkan pengaruhnya oleh kekuatan-kekuatan dunia. Pangsa pasar yang besar dan potensi sumberdaya alamnya yang melimpah membuat kawasan ini selalu menjadi ajang perebutan pengaruh negara-negara besar. Negara-negara besar yang mempunyai kepentingan terhadap kawasan ini diantaranya Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, Australia dan India. disamping negara-negara tersebut masih terdapat beberapa aktor yang mempunyai peran dalam organisasi ASEAN, tetapi peran mereka kurang nampak karena selain kondisi geografi yang jauh juga kepentingan nasional negara mereka yang kurang mementingkan kawasan ini. Beberapa aktor tersebut diantaranya Korea Selatan dan Uni Eropa. ASEAN merupakan mitra dagang nomor tiga terbesar bagi Korea selain Cina dan Uni Eropa<sup>14</sup>. Dalam mengamankan kepentingan ekonominya, para aktor tersebut tidak menutup kemungkinan akan menggunakan kekuatan bersenjata seperti yang tampak dalam hal pengamanan selat Malaka. Selat Malaka sebagai jalur pelayaran Internasional sangat vital peranannya bagi negara-negara besar sehingga isu keamanan di Selat tersebut mengundang keinginan campur tangan negara-negara besar<sup>15</sup>. Negara-negara besar seperti Amerika dan Jepang ingin secara langsung terlibat dalam kegiatan tersebut. Jika hal ini terjadi maka kedaulatan negara-negara di sekitar selat Malaka dapat terganggu sehingga Malaysia, Indonesia dan Thailand menolok ide tersebut. Kemampuan angkatan Bersenjata negara-negara kawasan untuk mengamankan wilayahnya menjadi kata kunci untuk menghindari keinginan campur tangan negara-negara besar dalam pengamanan tersebut. Saat ini pengamanan selat Malaka menggunakan kekuatan Laut dan Udara yang bekerja sama dengan negara-negara tetangga.

**1.3 Kondisi Alutsista TNI AU saat ini.** Secara umum kondisi Alutsista TNI AU saat ini kondisinya telah sangat berkurang baik dari segi jumlah dan teknologinya. Secara umum kondisi Alutista TNI AU terutama pesawat udara

---

<sup>14</sup> <http://www.tempointeraktif.com/hg/wirusaha/2009/06/01/brk,20090601-179106.id.html> 10 Nop 2009

<sup>15</sup> <http://berita.liputan6.com/luarnegeri/201003/266607/Singapura.Cemas.Keamanan.Selat.Malaka>

tingkat kesiapannya dibawah 35%<sup>16</sup>. Kesiapan alutsista yang rendah tersebut dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah dan upaya pembangunan kekuatan TNI AU tidak pernah dihadapkan dengan kondisi geopolitik Indonesia saat ini. Pembangunan kekuatan TNI AU sementara ini terkesan tambal sulam dengan mengganti pesawat yang sudah kadaluwarsa dan mengalami accident dengan pesawat yang baru. Rencana penggantian pesawat tempur OV-10F Bronco dengan Super Tucano dilakukan setelah terjadinya kecelakaan pesawat tempur tersebut yang merengut korban jiwa penerbangnya<sup>17</sup>. Upaya pembangunan kekuatan itupun masih menunggu dukungan politik dan anggaran yang tersedia dari legislatif dan eksekutif. Kisruh pengadaan pesawat tempur Sukhoi antara DPR dan pemerintah pada era pemerintahan Megawati menunjukkan bahwa belum terdapatnya satu pemahaman tentang pentingnya membangun sebuah Angkatan Udara yang kuat<sup>18</sup>. TNI AU akan menjadi kuat jika mempunyai Alutsista Udara yang diadakan sesuai dengan perkembangan geopolitik Indonesia. Pengertian tentang Alutsista TNI AU dapat dilihat pada buku Terminologi Angkatan Udara tahun 2002 bidang Logistik halaman 4 yang berbunyi “Alat Utama Sistem Senjata” adalah sistem persenjataan yang harus dimiliki oleh TNI AU untuk melaksanakan tugas pokok yang terdiri dari pesawat Terbang, Peluru Kendali dan Radar<sup>19</sup>. Dalam pengertian tersebut sangat jelas disebutkan bahwa tanpa adanya alutsista yang memadai maka TNI AU tidak akan mampu melaksanakan tugas pokoknya. Kondisi alut sista saat ini pengadaannya masih terkesan terbatas hanya pada kondisi kemampuan keuangan negara tanpa pernah dihadapkan dengan kebutuhan nyata akan perkembangan yang terjadi dikawasan Asia Tenggara.

---

<sup>16</sup> [Htp://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnurutisi=4](http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnurutisi=4) tgl 14 Sept 2009

<sup>17</sup> <http://www.depkominfo.go.id/berita/berita-utama-berita/ksau-prihatin-atas-jatuhnya-pesawat-ov-10-bronco-di-malang/> 20 Agustus 2009.

<sup>18</sup> <http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/2003/06/23/LU/mbm.20030623.LU88601.id.html> 10 Oktober 2009

<sup>19</sup> buku Terminologi Angkatan Udara tahun 2002 bidang Logistik hal 4

#### 1.4. Identifikasi Masalah.

Pasca reformasi sampai dengan masa Kabinet Indonesia Bersatu belum tampak upaya yang signifikan untuk membangun TNI khususnya TNI AU dengan benar-benar memperhatikan kondisi Geopolitik Indonesia. Pembelian pesawat tempur Sukhoi pada era Megawati dinilai oleh banyak pengamat dan LSM hanya sebagai upaya Pemerintahan Sipil untuk menjinakkan militer karena militer dianggap berjasa menjatuhkan Presiden Abdurachman Wahid<sup>20</sup>. Upaya membangun kekuatan TNI AU tidak terlepas dari pembangunan kekuatan TNI sehingga tantangan terhadap pembangunan kekuatan TNI selalu berdampak langsung terhadap TNI AU. Untuk saat ini pembangunan kekuatan TNI AU hanya diprioritaskan untuk mengganti Alutsista yang telah memasuki usia pensiun belum disesuaikan dengan kebutuhan akan menghadapi perubahan geopolitik kawasan.

Demikian juga dengan kebijakan pembangunan kekuatan TNI AU pada era Kabinet Indonesia bersatu yang mulai dilantik oleh Presiden Yudhoyono pada tanggal 21 Oktober 2004<sup>21</sup> sampai dengan berakhirnya masa jabatannya pada tanggal 15 September 2009 tidak nampak adanya kebijakan Anggaran pertahanan yang signifikan untuk pengadaan alutsista udara. Jumlah anggaran untuk pertahanan hanya berkisar pada angka 0,4% PDB yang besarnya hanya pada angka Rp 36,39 Trilyun<sup>22</sup>. Jumlah yang relatif sangat kurang untuk membiayai keseluruhan TNI atau kurang lebih hanya 36 % dari kebutuhan minimal. Sebagian besar anggaran tersebut tersedot hanya untuk Belanja Pegawai yang berarti hanya untuk gaji dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Sisa anggaran lainnya digunakan untuk pemeliharaan alutsista di mana jumlahnya sangat jauh dari kebutuhan minimum. Hal ini sangat dirasakan berat oleh TNI Angkatan Udara karena untuk bisa mengoperasikan pesawat-pesawat yang ada memerlukan dana Rp. 6,2 Trilyun pertahun, sedangkan alokasi anggaran yang diterima hanya

---

<sup>20</sup> MT Arifin, Sipil Militer Pasca Reformasi. Dalam buku Reformasi TNI Perspektif Baru Hubungan Sipil Militer di Indonesia. LP3ES kata sambutan.

<sup>21</sup> Kabinet Indonesia Bersatu/<http://www.presidentri.go.id/index.php/statik/kabinet.html>

<sup>22</sup> Marsda Pur Koesnadi K, Indonesia Air Strategy Jakarta Oktober 2009.

sebesar Rp. 350 Milyar (5,6 %) dari keseluruhan dana yang dibutuhkan. Dana yang tersedia saat ini tersedot hanya untuk pemeliharaan alutsista dengan skala prioritas tanpa ada anggaran untuk memperbaharui atau meremajakan alutsista yang telah memasuki usia senja. Dengan dana yang terbatas tersebut tidak memungkinkan untuk mempertahankan apalagi membangun kekuatan TNI AU.

Menurut Dr Bantarto Bandoro, sebagai negara yang memiliki letak geografis strategis dan luas wilayah yang paling besar di kawasan Asia Tenggara maka sudah sewajarnya Indonesia menuntut peran politik yang lebih besar dari pada negara-negara tetangga<sup>23</sup>. Masih menurut Bantarto peran yang lebih tersebut hanya akan terwujud jika Indonesia mempunyai national power yang kuat dimana salah satu elemennya adalah elemen Militer. Beliau menyadur dari Jane's Defense Weekly dan Militare Balance 2010 yang menyebutkan bahwa negara kawasan Asia Tenggara pada tahun 2012 akan menaikkan anggaran belanja Pertahanannya antara 8%- 9 %. Peningkatan belanja pertahanan kawasan tersebut termasuk dalam perkembangan geopolitik kawasan dan dapat dijadikan pembandingan untuk peningkatan anggaran pertahanan RI.

Kondisi geografi Indonesia yang berada di kepulauan dan dikelilingi oleh pegunungan tidak hanya menebar pesona keindahan alam semata. Kondisi geografi Indonesia juga menyimpan potensi bencana alam yang harus selalu diwaspadai. Keterlambatan penanganan bencana Alam dapat merambah keranah politik dalam negeri bahkan intervensi internasional. Dengan dalih intervensi kemanusiaan Negara-negara besar dapat dengan segera masuk keteritorial negara kita dengan dalih bantuan kemanusiaan. Pengiriman bantuan yang paling cepat adalah menggunakan sarana angkutan udara. Dalam beberapa kejadian bencana ditanah air tampak bahwa peran TNI AU masih belum maksimal karena keterbatasan Alutsista yang tersedia. Bencana alam Tsunami di Aceh tahun 2004 memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa kekuatan udara yang terbatas dari negara kita telah mengundang masuknya kekuatan udara negara-negara tetangga untuk masuk kedalam kedaulatan negara kita. Bantuan kemanusiaan oleh

---

<sup>23</sup> Bandaro Bantarto, <http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1992/BRI.htm>, 03 Maret 2010.

negara-negara asing tersebut sangat sulit dikontrol kegiatannya karena memang negara kita sangat memerlukan bantuannya. Dikemudian hari perlu dipikirkan untuk membangun kekuatan udara kita dihadapkan dengan kondisi geografi Indonesia yang rawan terhadap terjadinya bencana alam baik banjir, tanah longsor, gempa bumi, kecelakaan dilaut maupun bencana alam yang lainnya.

Dalam penulisan tesis ini terdapat beberapa pengertian diantaranya :

a. **Alutsista Udara.** Pengertian tentang Alutsista TNI AU dapat dilihat pada buku Terminologi Angkatan Udara tahun 2002 bidang Logistik halaman 4 yang berbunyi “Alat Utama Sistem Senjata” adalah sistem persenjataan yang harus dimiliki oleh TNI AU untuk melaksanakan tugas pokok yang terdiri dari pesawat Terbang, Peluru Kendali dan Radar. Dalam pengertian tersebut sangat jelas disebutkan bahwa tanpa adanya alutsista yang memadai maka TNI AU tidak akan mampu melaksanakan tugas pokoknya.

b. **Kesiapan.** Kesiapan mempunyai beberapa arti diantaranya : Menurut Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary pengertian tentang “Kesiapan adalah Kondisi Siap untuk beraksi atau digunakan”. Kondisi siap untuk beraksi dan digunakan menjadi kata kunci untuk kesiapan alutsista Udara yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas pokok TNI AU. Jika kondisinya tidak siap operasi maka kesiapan operasional TNI AU akan terganggu.

Menurut buku Terminologi Angkatan Udara tahun 2002 bidang logistik halaman 39, Kesiapan adalah kegiatan untuk mempertahankan kelaikan udara dan kemampuan operasional Alutsista Udara dalam kondisi siap melaksanakan misinya. Dalam pengertian ini lebih ditonjolkan dalam hal kegiatannya, yaitu kegiatan pemeliharaan yang memungkinkan Alutsista Udara tersebut selalu dalam kondisi siap.

Berdasarkan kondisi Alut Sista udara TNI AU yang sangat meprihatinkan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna Membangun TNI AU yang modern sesuai dengan perkembangan Geopolitik Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

#### 1.4.1. Pembatasan Masalah.

Dalam Penelitian, masalah yang dibahas akan terbatas pada :

1. Perkembangan geopolitik yang diteliti adalah perkembangan di kawasan Asia Tenggara selama tahun 2005-2009. Kawasan Asia Tenggara yang dibahas dalam penelitian ini bukan seluruh negara kawasan melainkan hanya pada beberapa negara yang menurut penulis mempunyai pengaruh langsung terhadap keamanan nasional Indonesia. Pemilihan periode tahun 2005 sampai dengan 2009 didasari akan terjadinya perubahan politik di Indonesia Pasca Pemilu Langsung dimana Presiden Yudhoyono terpilih sebagai Presiden menggantikan Megawati. Disamping itu pada 16 Oktober 2004 pemerintah telah mengesahkan UU N0 34 tentang TNI yang didalamnya memuat tentang tugas TNI profesional di era demokrasi. Periodenisasi ini akan membahas kebijakan pertahanan secara utuh kabinet Indonesia Bersatu terutama yang menyangkut tentang pembangunan TNI AU.
2. Negara-negara kawasan yang mendapat perhatian adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, Vietnam, China dan Australia. Negara-negara tersebut dibahas karena mempunyai pengaruh langsung terhadap Indonesia karena masih terdapat permasalahan perbatasan secara langsung.
3. Potensi ancaman yang ditimbulkan dari perubahan geopolitik yang diteliti adalah yang bersifat ancaman militer.
4. Pembangunan TNI AU yang dimaksud hanya di bidang Alutsista Pesawat Udara dan kesiapan Radar Pertahanan Udara.

### 1.5. Perumusan Masalah.

Berdasarkan analisa terhadap data-data yang didapatkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan “ Bagaimana membangun TNI AU dihadapkan dengan perkembangan Geopolitik Indonesia dan kawasan”.

**1.5.1 Pertanyaan Penelitian.** Apakah pembangunan Postur TNI AU sudah sesuai dengan perkembangan geopolitik Indonesia dan Kawasan?

- a. Dari segi anggaran, Bagaimana dukungan anggaran yang dialokasikan kepada TNI AU, apakah sudah dapat mendukung pembangunan kekuatan ?
- b. Dari segi alutsista, Bagaimana tingkat kesiapan alutsista TNI AU pada saat itu, apakah telah siap menghadapi tantangan perubahan geopolitik kawasan?

### 1.6. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

#### 1.6.1. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembangunan Postur TNI AU selama ini yang belum sepenuhnya dihadapkan dengan perkembangan geopolitik Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

#### 1.6.2. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai salah satu alternatif bahan kajian tentang kebijakan pembangunan TNI AU dengan menggunakan pendekatan perkembangan geopolitik Indonesia dan wilayah sekitar sehingga diharapkan pembangunan kekuatan TNI AU dimasa yang akan datang akan sesuai dengan perkembangan geopolitik kawasan.

## BAB 2

### 2. Kerangka Teori.

Membangun sebuah Angkatan bersenjata yang kuat oleh sebuah negara yang sedang berusaha keluar dari sebuah krisis ekonomi ibarat buah simalakama. Dilaksanakan akan membuat pemulihan ekonomi negara tersebut menjadi tersendat, tidak dilaksanakan ancaman terhadap kedaulatan negara tersebut menjadi rentan. Demikian juga dengan Indonesia yang masih bergelut dengan pemulihan perekonomian sebagai akibat resesi dunia tetapi dilain pihak mempunyai TNI/TNI AU yang kuat mutlak diperlukan untuk menjaga kedaulatan sebuah negara seluas Indonesia.

Pembangunan Kekuatan TNI AU memerlukan anggaran yang besar sehingga menjadi hal yang tidak populer bagi para politisi untuk mengangkat isu tersebut dimana pada saat bersamaan negara sedang berupaya memerangi angka kemiskinan ditanah air. Untuk itulah pembangunan kekuatan TNI AU kedepan harus dihadapkan dengan perubahan geopolitik kawasan yang disesuaikan dengan teori/konsep yang telah ada agar dapat diterima oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.

**2.1. Teori Geopolitik.** Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik dapat digambarkan sebagai hubungan antara negara dalam satu kawasan geografi. Faktor geografi menjadi faktor fundamental dalam politik Internasional karena letaknya yang permanen<sup>24</sup>. Salah satu ilmuwan yang terkenal memperkenalkan teori ini adalah Frederich Ratzel. Ratzel adalah ilmuwan Jerman yang menyebutkan bahwa ilmu geopolitik adalah ilmu yang mempelajari geografi suatu bangsa dan politik yang berkembang dikawasan tersebut. Ratzel kemudian menyebutnya menjadi geographical politic dan disingkat geopolitik<sup>25</sup>. Menurut Frederich Ratzel sebuah negara dengan batas-batasnya tidak statis tetapi selalu tumbuh dan berkembang bahkan jika

---

<sup>24</sup> Francis P. Sempa, Geopolitics from the Cold War to the 21<sup>st</sup> Century, hal 5

<sup>25</sup> Randall Collins: Conflict & Geopolitical Theory,

perkembangannya sedemikian kuat akan mampu mencaplok negara-negara lemah yang berada disekitarnya. Untuk mengamankan geopolitik sebuah negara tersebut maka diperlukan pengamanan batas negara dengan membangun angkatan Perang yang kuat<sup>26</sup>. Teori tentang geopolitik Ratzel berkembang dan diikuti dengan pemikir yang lain seperti Rudolf Kjellen.

Dari teori ini tampak bahwa pembangunan angkatan bersenjata sebuah negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik kawasan tempat berdomisilinya negara tersebut. Negara-negara sebuah kawasan selalu berkembang dan pada akhirnya jika menyangkut masalah Kepentingan Nasionalnya terganggu maka sangat mungkin akan terjadi gesekan dikawasan tersebut. Presiden Yudhoyono dalam amanatnya didepan Rapim TNI tanggal 25 Januari 2010 menyebutkan bahwa perang-perang yang telah dilalui oleh TNI dimasa lalu merupakan keputusan politik bangsa ini<sup>27</sup>. Lebih lanjut Beliau mengatakan perkembangan geopolitik Dunia dari Bipolar menjadi Multi Polar telah menghasilkan ancaman dunia baru diantaranya Peace and security, clash of civillization, ideologi, economy imbalances, communicable diseases dan Climate Change yang semuanya itu perlu grand strategy untuk penanganannya termasuk TNI didalamnya. Lebih lanjut Presiden memberikan instruksi kepada jajaran TNI untuk terus melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan yang terarah, terencana, sesuai dengan hakekat ancaman, kondisi geografi, kemampuan negara, serta perkembangan dunia militer (Revolution in Military Affairs) RMA yang juga dianut oleh negara-negara lain.

**2.2. Teori Kaum Realis HI dari Morgenthau 1960<sup>28</sup>.** Teori ini menekankan bahwa suatu negara harus mempunyai National Security Policy untuk berdampingan dengan negara-negara disebuah kawasan. Untuk mendapatkan kebijakan keamanan Nasional yang kuat maka sebuah negara harus memiliki Angkatan Bersenjata. Masih menurut teori tersebut kekuatan Militer biasanya

---

<sup>26</sup>Farida Sarimaya [http://file.upi.edu/Direktori/B\\_FPIPS/JURPEND\\_SEJARAH/-/SJRH\\_POLITIK/GEOPOMTIK.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/B_FPIPS/JURPEND_SEJARAH/-/SJRH_POLITIK/GEOPOMTIK.pdf) 04 Nopember 2009

<sup>27</sup> <http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2010/01/25/1317.htm> 01 Maret 2010

<sup>28</sup> Robert jackson & Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional. Hal 5

dianggap sebagai suatu kebutuhan sehingga negara-negara dapat hidup berdampingan dan berhadapan satu dengan yang lainnya tanpa terintimidasi atau takluk. Banyak negara-negara yang turut serta dalam aliansi-aliansi dengan negara lain untuk meningkatkan keamanan Nasionalnya. Untuk menjamin agar tidak ada negara berkekuatan besar berhasil mencapai posisi hegemoni berdasarkan intimidasi atau penggunaan kekuatan yang sewenang-wenang, maka penting bagi satu negara untuk membangun dan memelihara keseimbangan kekuatan militernya. Demikian juga dengan bangsa Indonesia yang berdiam dikawasan Asia Tenggara suatu kawasan yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dimana hubungan antar negara dikawasan ini telah berjalan dengan baik dan diwadahi didalam ASEAN.

Secara umum pembentukan ASEAN bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya serta untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui taat menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB<sup>29</sup>. ASEAN terbentuk setelah kawasan ini bergolak selama tahun 1960an yang menyebabkan negara-negara kawasan tidak dapat secara optimal membangun negerinya akibat konflik sesama negara dikawasan. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa konflik di kawasan Asia Tenggara telah mengundang kehadiran kekuatan-kekuatan Militer negara Besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet dan China untuk ikut menyelesaikan konflik tersebut. Perang Vietnam membuktikan bahwa campur tangan pihak luar akan terjadi jika negara-negara kawasan tidak mampu menyelesaikannya persoalan keamanan dikawasan.

Pada perkembangannya ASEAN saat ini telah mampu menciptakan suatu kawasan yang cukup stabil walaupun masih terdapat sengketa-sengketa perbatasan antara sesama anggota ASEAN seperti Indonesia-Malaysia, Singapura-Malaysia, Thailand-Kamboja dan klaim tumpang tindih di Kepulauan Spratly. Selama ini penyelesaiannya masih melalui sarana diplomasi tetapi tidak menutup

---

<sup>29</sup> Deklarasi ASEAN ayat 1 dan 2 <http://www.aseansec.org/0111091700>

kemungkinan sengketa perbatasan yang ada akan berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan kekuatan Angkatan Bersenjata masing-masing negara. Demikian pula dengan Indonesia yang mempunyai masalah perbatasan, perlu untuk mempersiapkan Angkatan Bersenjatanya termasuk TNI AU didalamnya agar penyelesaian secara diplomasi akan menjadi kuat. Salah satu cara diplomasi militer yang sangat mungkin dilakukan adalah dengan menghadirkan patroli Udara dan laut disekitar daerah yang dipersengketakan seperti kawasan sengketa. Kehadiran militer dikawasan sengketa hanya mungkin jika kesiapan operasional Alutsista TNI tinggi, jika tidak tersedia kesiapan operasional yang tinggi niscaya kehadirannya sebagai diplomasi militer akan sia-sia. Ketersediaan alutsista yang siap operasional ditentukan dengan pembangunan kekuatan yang telah terencana dengan baik yang selalu dihadapkan dengan perkembangan geopolitik kawasan.

### **2.3. Teori Kebijakan Keamanan Nasional dari Samuel P.Huntington.**

Menurut Huntington sebuah negara hendaknya menyusun kebijakan Keamanan Nasionalnya dengan meningkatkan keamanan institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik bangsa terhadap berbagai ancaman negara lain. Lebih lanjut Huntington menjelaskan bahwa kebijakan keamanan Nasional terdiri tiga bentuk yaitu Kebijakan keamanan Militer, kebijakan keamanan Internal (subversi) dan kebijakan keamanan situasional (perubahan jangka panjang sosial, ekonomi, demografi, politik<sup>30</sup>). Teori ini menjelaskan bahwa Keamanan Nasional menjadi tugas banyak komponen bangsa, tidak menjadi domain Angkatan Bersenjata semata. Kebijakan Keamanan Nasional di Indonesia juga tidak terlepas dari konsep tersebut dimana TNI hanya sebagai salah satu bagian didalamnya. Keputusan politik yang berpihak terhadap pembangunan dan pengembangan Angkatan Bersenjata yang proporsional sangat dibutuhkan. Sesuai dengan amanat UU No 34 tahun 2004 memberikan Peran Menteri Pertahanan dalam membuat kebijakan pertahanan termasuk didalamnya kebijakan anggaran pertahanan dimana harus diselaraskan dengan Departemen lainnya. Secara umum tugas terpenting menteri menurut Huntington adalah menyusun

---

<sup>30</sup> Prajurit dan Negara (Teori dan Politik Hubungan Militer-Siil) Samuel P.Huntington.

Pt Grasindo. (ix)

rekomendasi tahunan angkatan bersenjata bagi Presiden, hal ini termasuk nasehat yang menyangkut :

- a. Kekuatan angkatan Bersenjata (jumlah divisi, kapal perang, pesawat udara yang ada).
- b. Tingkat angkatan Bersenjata.
- c. Kesiapan Angkatan Bersenjata
- d. Disposisi Angkatan Bersenjata.

Semua nasehat diatas dijelaskan tentang anggaran keuangan melalui rekomendasi anggaran militer.yang telah dibicarakan sebelumnya dengan DPR. Keputusan politik tersebut bermuara kepada kebutuhan keamanan suatu bangsa untuk melanjutkan pembangunan Nasionalnya. Bagaimana mungkin Militer Indonesia dapat mendampingi peran diplomasi para Diplomatnya jika kemampuan operasional Alut Sistanya sangat rendah dan tidak sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Tingkat Operasional Alut Sista menjadi salah satu tolok ukur kemampuan sebuah Angkatan Bersenjata suatu Negara Sebagai negara kepulauan yang sangat luas peran kehadiran Alut Sista Udara dan Laut didaerah yang rawan konflik serta daerah tumpang tindih klaim dengan negara tetangga akan sangat mendukung kegiatan diplomasi negara kita.

**2.4. The Theory of Air Power.** Didalam buku Terminologi TNI AU dijelaskan bahwa Kekuatan Udara adalah suatu kekuatan yang diupayakan untuk dapat menguasai, mempertahankan dan mendayagunakan ruang udara dan seluruh potensi nasional aspek dirgantara, baik masa perang dan damai<sup>31</sup>. Dari pengertian tersebut tampak bahwa Air Power (Kekuatan Udara) dapat digunakan sebagai salah satu Instrument dalam pencapaian kepentingan Nasional Suatu Negara.

---

<sup>31</sup> Terminologi TNI AU, Skep Kasau No: Skep/116/IX/2002.

2.4.1 **General Guilio Douhet**<sup>32</sup>. Menurut Douhet, “Angkatan udara yang mandiri dapat diselaraskan dengan angkatan lain (AD dan AL) jadi bukan sebagai pelengkap dari angkatan Darat dan Laut”. Konsep ini telah diadopsi oleh TNI dimana kedudukan masing masing angkatan adalah sama dan diatur didalam undang-undang. Penggunaan kekuatan angkatan Udara dan angkatan lainnya jika digunakan secara harmonis untuk tujuan yang sama terutama saat perang akan menghasilkan kemenangan walaupun kekuatan udara dapat digunakan secara independent untuk sebuah operasi tanpa melibatkan kekuatan AD dan AL. Penggunaan kekuatan udara dapat melewati batas sebuah negara tanpa harus merusaknya seperti jika menggunakan kekuatan darat dan laut.

Sebuah negara dengan kekuatan udara yang kuat akan memiliki kemampuan ofensif yang kuat. Sebuah negara dengan kemampuan ofensif yang besar akan menikmati posisi yang menguntungkan dalam sebuah kawasan karena negara tersebut dapat menyerang posisi pasukan musuh dan jalur logistiknya. Untuk alasan tersebut Kekuatan Udara merupakan senjata ofensif yang dapat digunakan untuk menyerang dengan cepat dan secara tidak terduga tanpa dapat dielakkan. Memiliki Angkatan Udara yang kuat dapat menguasai ruang udara serta merebut supremasi udara dan dapat dilanjutkan dengan serangan-serangan kesasaran yang mematikan. Dengan begitu pembangunan kekuatan Perang harus mengutamakan pembangunan kekuatan udara<sup>33</sup>.

Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan mempunyai perbatasan laut yang panjang dengan negara-negara tetangganya sangat membutuhkan kehadiran kekuatan udara yang kuat di samping kekuatan laut tentunya. Pembangunan kekuatan udara negara-negara kawasan sekitar Indonesia saat ini telah melampaui tingkat kewajaran. Hal itu tampak dengan semakin besarnya pembelanjaan untuk pembelian pesawat-pesawat tempur modern yang pada akhirnya dapat digunakan tidak hanya untuk memperkuat

---

<sup>32</sup> Guilio Douhet, *Theory of Air Power, Modern Strategic Thought to Nuclear warfare*, Shekhar Adhikari hal 195-200

<sup>33</sup> Letjen TNI (Pur) Sayidiman Suryohadiprojo, *Si Vis Pacem Para Bellum*, Gramedia Pustaka jakarta 2005 hal 23-24

pertahanan negara tersebut tetapi juga untuk agenda tersembunyi dari negara kawasan tersebut. Kekuatan udara yang kuat dan besar dapat digunakan sebagai alat menekan negara lain karena kuat udara dapat digunakan sebagai senjata yang ofensif.

**2.4.2 Kekuatan Udara sebagai Instrument Nasional<sup>34</sup>.** Menurut Air Vice Marshal Tony Mason dalam buku *Air Power* menyebutkan bahwa kekuatan udara dapat digunakan sebagai Instrument Nasional sebuah negara dalam mencapai dan mengamankan kepentingan Nasionalnya. Contoh yang paling nyata adalah Perang enam hari antara Israel dan Arab dimana untuk mengamankan kepentingan nasionalnya, Israel menggunakan kekuatan udara untuk melakukan serangan ofensif ke negara-negara Arab yang menyebabkan kekuatan udara Arab lumpuh. Berkat keunggulan udara tersebut, maka pasukan darat Israel mampu mengalahkan pasukan Mesir, Suriah dan Yordania yang secara jumlah lebih besar dari kekuatan Israel. Setelah selesainya perang enam hari yang dimenangkan oleh Israel, maka wilayah Israel bertambah luas dengan mendapatkan jazirah Sinai, Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan. Dari segi politik pengaruh Perang Enam Hari tahun 1967 amat besar. Israel memiliki wilayah yang cukup luas untuk digunakan dalam tawar menawar politik dengan negara-negara terangnya. Israel mampu menggunakan Angkatan Udaranya untuk memulai serangan-serangan udara strategis (*preemptive strike*) yang dapat merubah keseimbangan politik sebuah kawasan. Teori ini semakin memperkuat teori Air Power, bahwa negara yang mempunyai Angkatan Udara yang kuat akan dapat digunakan sebagai alat untuk mengamankan kepentingan Nasionalnya.

Kemampuan sebuah negara dalam menggunakan kekuatan Udara sebagai Instrument Nasional Policy dapat dilihat dari kriteria sebagai berikut<sup>35</sup> :

- a. Kemampuan Industri Dirgantara negara tersebut yang mencerminkan tingkat penguasaan teknologi.

---

<sup>34</sup> Air Vice Marshal Tony Mason, *Air Power*, hal 66-79

<sup>35</sup> *Ibid* hal 237

- b. Industri dirgantara tersebut berkembang didukung dengan riset yang maju.
- c. Adanya kemauan dari pemerintah untuk membangun dan melindungi industri dirgantara nasionalnya.
- d. Jumlah dan kekuatan Angkatan Udara negara tersebut.

#### 2.4.3. **Membangun Kekuatan Udara Suatu Perspektif Geopolitik.**

Teori ini dikemukakan oleh DR Yeo Ning Hong mantan menteri pertahanan Singapura tahun 1991 dalam seminar tentang Air Power di Canberra Mei 1994<sup>36</sup>. Menurut DR Yeo Ning Hong berakhirnya Perang Dingin tidak serta merta membuat dunia menjadi tambah aman. Kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat, Jepang dan China terutama dalam hal persaingan perdagangan dunia. Masih menurut DR Yeo, persaingan tersebut akhirnya juga merembet ke isu-isu populer seperti HAM, Lingkungan hidup bahkan ke masalah terorisme yang dapat berkembang setiap saat tergantung dari hubungan internasional ketiga negara tersebut. Ketidakpastian hubungan para negara aktor kunci tersebut membuat negara-negara kawasan harus bersiap siaga dengan membangun kekuatan bersenjata yang kuat.

Lebih lanjut DR Yeo menyebutkan bahwa Pembangunan Angkatan Udara yang modern adalah suatu komponen kritis dari suatu kemampuan pertahanan yang kuat. Saat ini negara-negara Asia Tenggara tengah memperkuat Angkatan Udara mereka. Pembangunan kekuatan udara tersebut merupakan satu unsur essential bagi stabilitas kawasan berupa pertahanan yang kuat. Stabilitas kawasan Asia Tenggara menjadi tanggung jawab negara-negara kawasan tersebut karena tidak ada negara lain yang akan peduli terhadap hal itu, menurut Yeo. Angkatan udara mempunyai respon yang paling cepat untuk menangkal agresor yang akan menyerang dengan mencegatnya sejauh mungkin diluar wilayah kedaulatan. Teory Dr Yeo sesuai dengan pola gelar yang dilakukan oleh TNI AU dimana untuk menghadapi ancaman serangan musuh, TNI AU membagi menjadi

---

<sup>36</sup> DR Yeo Ning Hong, Kekuatan Udara: Suatu Perspektif Geopolitik Singapura, Perang di Udara, Canberra 1994, hal 19-25.

3 palagan dimana palagan terluar adalah Palagan III di luar ZEE, langsung berhadapan dengan ancaman yang datang.

Teori diatas sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia dimana kekuatan TNI AU seharusnya menjadi ujung tombak menghadapi ancaman militer yang datang dari luar. Ancaman tersebut dapat secara langsung menyerang obyek –obyek vital nasional karena saat ini banyak obyek vital yang terletak didaerah perbatasan ataupun di jalur-jalur pelayaran pendekat.

## BAB 3

### METODA PENELITIAN

3. **Umum.** Kata penelitian berasal bahasa Inggris yang berasal dari kata *research* yang berarti *re* kembali dan *to search* yang berarti mencari<sup>37</sup>. Penelitian didefinisikan sebagai suatu penyelidikan yang sistematis dan metodis atas suatu masalah untuk menemukan solusi atas masalah tersebut dan menambah khasanah pengetahuan<sup>38</sup>. Demikian juga dengan penulis yang ingin mencari alternatif pendekatan untuk membangun TNI AU yang kuat dihadapkan dengan kondisi geopolitik Indonesia terutama kawasan Asia Tenggara yang selalu berubah sehingga mampu menghasilkan solusi bagi pembangunan kekuatan TNI AU dimasa yang akan datang.

3.1. **Pendekatan dan Jenis Penelitian.** Penelitian yang dilakukan penulis dalam penulisan tesis ini bersifat sosial karena menyangkut gejala sosial dan berupaya menemukan jawabannya. Penelitian sosial adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan sosial<sup>39</sup>. Penulis menggunakan metoda penelitian Kualitatif dan bersifat diskriptis analitis. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif<sup>40</sup>. Masih menurut sumber tersebut, penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti bertolak pada data bahwa kekuatan TNI AU saat ini sangat tidak sesuai bagi mempertahankan kedaulatan NKRI terlebih dengan perkembangan geopolitik Asia tenggara yang selalu berubah dan diharapkan akan mampu menyumbangkan teori baru bagi membangun TNI AU dihadapkan dengan teori geopolitik dan teori Air power.

---

<sup>37</sup> Ulber Silalahi, *Metoda Penelitian Sosial*, Unpar Press 2006. hal 1

<sup>38</sup> Ibid hal 2

<sup>39</sup> Ibid hal 3

<sup>40</sup> Sudiro, [http://eprints.undip.ac.id/5785/1/PENELITIAN\\_KUALITATIF-.pdf](http://eprints.undip.ac.id/5785/1/PENELITIAN_KUALITATIF-.pdf) 12 Nopember 2009

3.2. **Kehadiran Peneliti.** Penulis sekaligus bertindak sebagai peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Penulis sebagai Peneliti, secara langsung melakukan pengumpulan data di lapangan dan serta mengolahnya menjadi bahan yang selanjutnya akan dibandingkan satu sama lain sehingga menghasilkan data yang valid. Kehadiran penulis sebagai peneliti diketahui statusnya sebagai mahasiswa UNHAN oleh seluruh obyek penelitian karena dari pihak Akademika membekali penulis dengan surat keterangan untuk melakukan penelitian.

3.3 **Lokasi dan Waktu Penelitian.** Lokasi penelitian seluruhnya berada di dalam negeri dengan mengumpulkan literatur dari perpustakaan-perpustakaan yang berada baik di jajaran TNI maupun perpustakaan Nasional. Disamping itu, data tentang obyek penelitian juga penulis dapatkan secara langsung di Mabes TNI AU terutama di staf perencanaan. Penelitian yang dilakukan penulis dimulai sejak bulan Agustus 2009 dengan mulai mengumpulkan data-data awal yang mungkin akan menjadi bahan penulisan.

3.4 **Sumber Data.** Sumber data yang penulis gunakan adalah data Primer maupun data sekunder. Data Sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Penulis mendapatkan data dari berbagai literatur-literatur, Buku-buku Jurnal, Majalah Militer dan Surat Kabar. Sedangkan data Primer penulis dapatkan langsung dari para pejabat di jajaran staf Perencanaan Mabes TNI AU dan dokumen resmi yang dikeluarkan Mabes TNI/TNI AU. Didalam mengumpulkan data, penulis berusaha mendapatkan data sebanyak mungkin untuk menambah obyektivitas hasil yang didapat.

3.5. **Prosedur Pengumpulan data.** Prosedur pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan Kajian keanekaan dokumen, wawancara terbuka dengan Staf Perencanaan Mabesau tentang pengembangan TNI AU saat ini dan dokumentasi surat kabar dan majalah.

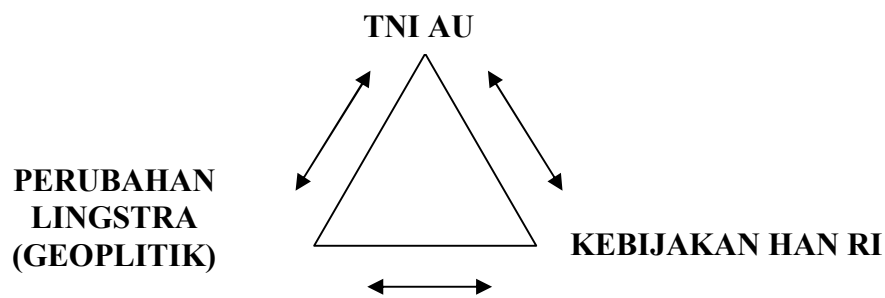
3.6. **Analisa Data.** Analisa data yang dilakukan oleh penulis dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Analisa data berlangsung secara berkelanjutan dan Induktif. Induktif yang dimaksud adalah dengan mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Dari data yang terkumpul penulis mencoba menganalisa dengan membandingkan hasil temuan antar data.

3.7. **Pengecekan Keabsahan Temuan.** Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, penulis melaksanakan penelusuran secara langsung dan memilih data-data yang dari sumber dapat dipercaya berupa jurnal maupun buku-buku yang ditulis oleh pengarang yang ahli dibidangnya. Disamping itu penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan secara langsung terhadap perencanaan di jajaran Mabes TNI AU.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN dan ANALISIS

4. Pembahasan tentang Kebijakan Pembangunan TNI AU yang dihadapkan dengan Perkembangan Geopolitik kawasan meliputi penelitian tentang perkembangan dan perubahan geopolitik negara-negara kawasan Asia tenggara , Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam bidang Pertahanan khususnya pembangunan TNI AU dan yang terakhir adalah kebijakan TNI AU dalam menyikapi kedua komponen yang saling berpengaruh tersebut. Hubungan interaksi tersebut dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini.



Gambar. 4.1 Hub antara Jaks pemb TNI AU, Geopolitik dan Jaks HAN RI

#### 4.1 Geopolitik Kawasan.

4.1.1 **Indonesia.** Tahun 2004 bangsa Indonesia memasuki masa Demokrasi baru yang ditandai dengan pemilihan Presiden secara langsung. Hasil pemilu Presiden menghantarkan pasangan Yudhoyono dan Yusuf Kalla sebagai Presiden dan wakil Presiden mengalahkan pasangan Megawati dan Hasyim.M. Kemenangan pasangan tersebut cukup telak karena perbandingan suaranya 60,62% dibanding 39,38%<sup>41</sup>. Sosok Presiden Yudhoyono yang berlatar belakang

<sup>41</sup> <http://www.partai.info/pemilu2004/> 30 Juni 2010

Militer pada awalnya banyak mendapat sorotan dari kalangan lawan politiknya yang selalu menggunakan isu kembalinya militer dalam iklim demokrasi Indonesia akan membawa kemunduran dunia demokrasi Indonesia. Tetapi keberhasilan Pemilu langsung tersebut juga membuat Indonesia diakui sebagai negara Demokrasi terbesar ketiga didunia setelah India dan Amerika Serikat. Sistem demokrasi ternyata tidak serta merta membuat permasalahan bangsa menjadi selesai.

Pada 26 Desember 2004 bangsa Indonesia dikejutkan dengan musibah besar Tsunami yang terjadi di Aceh dan Sumatera bagian utara. Musibah tersebut terjadi ketika Aceh sedang dilanda konflik bersenjata antara GAM dan TNI. Untuk menanggulangi musibah tersebut Presiden Yudhoyono membuat kebijakan *Open Door* suatu kebijakan *Military Operation Other Than War* (MOOTW) yang melibatkan kerjasama militer Internasional dalam rangka misi kemanusiaan yang berada dibawah kendali TNI<sup>42</sup>. Kebijakan *open door* oleh DR Dino P dianggap sebagai kesempatan bagi TNI untuk berkibar memainkan salah satu perannya dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti yang tercantum dalam UU No 34 tahun 2004. Pendapat tersebut menurut penulis sangat tepat karena peran TNI dalam OMSP sebenarnya masih menjadi perdebatan saat itu karena pada pasal 7 ayat 3 masih mencantumkan ‘hanya bisa dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara’. Ayat 3 menunjukkan bahwa masih terdapatnya resistensi dari masyarakat terhadap peran TNI. Kebijakan *open door* juga memperlihatkan bahwa perlengkapan militer ternyata juga bisa digunakan untuk misi kemanusiaan dan itu banyak dilakukan oleh militer asing dalam misi kemanusiaan di Aceh. Peran TNI dalam OMSP saat itu sebenarnya akan tampak lebih besar jika saat itu TNI/TNI AU memiliki kekuatan alutsista pesawat Transport maupun Hellykopter yang jumlahnya memadai. Karena TNI AU memiliki keterbatasan kesiapan dan jumlah Alutsista Udara maka peran dukungan udara bagi bantuan kemanusiaan banyak diperankan oleh pesawat angkut militer asing baik menggunakan pesawat Hellykopter maupun pesawat Angkut bersayap tetap.

---

<sup>42</sup> DR Dino Patti Djalal, HARUS BISA Seni Memimpin ala SBY, R&W Jakarta 2008 hal 40.

Era pemerintahan Presiden Yudhoyono juga banyak dilihat sebagai era bangkitnya kembali politik luar negeri Indonesia terutama dikawasan ASEAN terutama setelah terpuruk akibat tumbanganya Presiden Soeharto. Pada era Presiden Soeharto bangsa Indonesia mendapat kedudukan yang terhormat sebagai yang negara yang disegani dikawasan regional dimana salah satu indikatornya adalah tempat sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Peran Indonesia mulai memudar bersamaan bergulirnya reformasi ditanah air dimana pemimpin nasional pengganti Presiden Suharto kurang mendapat respon positif dari negara-negara tetangga. Peran itu kembali dimunculkan oleh Presiden Yudhoyono dengan sebutan sebagai Pemimpin yang Nasionalis dan Internasionalis dari hasil kepemimpinan beliau terutama dalam pembangunan politik luar negeri Indonesia<sup>43</sup>.

Pada era Presiden Yudhoyono juga berhasil menuntaskan regenerasi 3 Panglima TNI secara aman tanpa gejolak. Pergantian Panglima TNI dari Jendral TNI Endriartono ke Marsekal TNI Joko Suyanto sempat menjadi bola panas di DPR karena perbedaan pandangan antara komisi I dengan Presiden Yudhoyono<sup>44</sup>. Pergantian tersebut menandai untuk kali pertama Panglima TNI dijabat oleh PATI Angkatan Udara. Selanjutnya Marsekal Joko Suyanto digantikan Jendral TNI Djoko Santoso sebagai Panglima TNI pada 28 Desember 2007.

Pada pertengahan tahun 2009 Indonesia terlibat ketegangan dengan Malaysia mengenai klaim wilayah Ambalat. Kedua negara saling menghadirkan kekuatan udara dan laut dalam perselisihan tersebut. Konflik Ambalat membuat perubahan orientasi tugas TNI dari sebelumnya secara tradisional TNI hanya digunakan untuk menumpas pemberontakan dalam negeri menjadi upaya untuk mengembangkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk menjaga Kepentingan nasional sebagai negara kepulauan<sup>45</sup>. Konflik Ambalat juga menunjukkan bahwa “Semakin besar sebuah Negara yang memiliki posisi strategis serta sumberdaya alam yang besar maka semakin besar pula negara tersebut

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/d/djoko-soeyanto/index.shtml> 10 Mei 2010

<sup>45</sup> Military Balance 2010, hal 384

memerlukan Angkatan Bersenjata besar dan kuat untuk mengamankan negara tersebut<sup>46</sup>. Pernyataan ini sangat relevan untuk negara sebesar Indonesia.

**TABEL ANGGARAN PERTAHANAN  
INDONESIA**

TA	GDP	ANGGRAN HAN	PER CAPITA	ARMY	NAVY	AIR FORCE
2008	US\$ 511 bn	US\$ 3,4 bn	US\$ 2.151			
2009	US\$ 559 bn	US\$ 3,5 bn	US\$ 2.328	<b>233.000</b>	<b>45.000</b>	<b>24.000</b>
				☼ <b>400.000</b> ☼ <b>280.000</b>	☼ <b>1.000</b>	☼ <b>600</b>

(Sumber : Military Balance 2010)

☼ Parramiliter

☼ Cadangan

**Angkatan Udara.** TNI AU hanya memiliki 96 pesawat tempur /militer.

- FTR 25: 3 Su-27SK *Flanker* (AD); 7 F-16A *FightingFalcon*; 3 F-16B *Fighting Falcon*; 8 F-5E *Tiger II*; 4 F-5F *Tiger II*.
- FGA 49: 3 Su-30 MKI *Flanker*; **11 A-4E Skyhawk**; 7 *Hawk* MK109; 28 *Hawk* MK209.
- FAC **12 OV-10F Bronco\*** (mostly non-operational).
- TKR 2 KC-130B *Hercules*.
- TPT 61: **1 B-707**; 3 B-737-200; 8 C-130B *Hercules*; 4 C-130H *Hercules*; 6 C-130H-30 *Hercules*; 2 L-100-30; 10 CN-235-110; **5 Cessna 401**; **2 Cessna 402**; 6 F-27-400M *Troopship*; 1 F-28-1000; 2 F-28-3000; **10 NC-212** (CASA 212) *Aviocar*; **1 SC.7 3M Skyvan** (survey).
- UTL **6: 2 Cessna 172**; **4 Cessna 207 Stationair**.
- TRG 101: 39 AS-202 *Bravo*; 7 *Hawk* MK53\*; 7 KT-1B; **19 SF-260M/SF-260W Warrior**; 20 T-34C *Turbo Mentor*; 6 T-41D *Mescalero*; **1 TA-4H Skyhawk\***; **2 TA-4J Skyhawk\***
- HELICOPTERS SAR 10 S-58T SPT 16: 5 NAS-332L (AS-332L) *Super Puma* (VIP/CSAR); 11 NAS-330 (SA-330) *Puma* (1 NAS-330SM VIP) UTL 12 EC-120B *Colibri*
- MSL • TACTICAL ASM AGM-65G *Maverick* AAM AIM-9P *Sidewinder* (semua data diambil dari Jurnal Military Balance 2009)

Kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan disamping menguntungkan juga mempunyai tingkat kerawanan. Kerawanan tersebut dapat berupa militer maupun nir militer seperti ancaman bencana alam. Kerawanan tersebut sebenarnya dapat ditanggulangi jika Indonesia mempunyai TNI/TNI AU

<sup>46</sup> Ashley J. Tellis and Michael Wills , *Military Modernization in Asia strategic asia 2005–06* Washington

yang kuat. Pembangunan kekuatan TNI/TNI AU sebagai salah satu element nasional belum optimal.

#### 4.1.2. **Malaysia.**

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Kepala negara Malaysia adalah Yang di Pertuan Agung dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Saat ini Malaysia telah tumbuh menjadi negara modern terutama sejak dipimpin oleh Perdana Menteri Mahatir Mohamad. Pada periode tersebut Malaysia telah bergeser dari Ekonomi berbasis pertanian menjadi ekonomi berbasis manufaktur/industri.

Sistem politik di Malaysia selama ini selalu didominasi oleh partai pemerintah UMNO. Tetapi akhir-akhir ini sudah mulai terjadi penolakan disebagian masyarakat Malaysia atas dominasi tersebut terutama dari golongan minoritas India dan China. Mereka menganggap terjadi politik diskriminasi terhadap etnis selain Melayu yang mayoritas beragama Muslim. Keadaan semakin parah dengan ditambah oleh kasus pemecatan Dato Anwar Ibrahim dari UMNO yang sebelumnya dipersiapkan untuk menggantikan Mahatir Muhamad. Tetapi secara keseluruhan politik dalam negeri Malaysia cukup stabil berkat diberlakukannya Internal security Act (ISA). Saat ini Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Razak.

Pemerintah Malaysia mempunyai hubungan diplomatik yang pasang surut dengan Pemerintah Indonesia. Pada era tahun 60an Indonesia terlibat dalam konfrontasi bersenjata dengan Malaysia yang baru berakhir pada tahun 1966. Walaupun konflik kedua negara telah berakhir, ternyata masih menyisakan konflik yang dapat mengganggu hubungan kedua negara seperti yang terjadi dengan lepasnya dua pulau Sipadan dan Ligitan serta konflik kepemilikan

perairan Ambalat. Ketegangan kedua Negara jiran ini juga dipicu oleh perlakuan aparat pemerintah maupun masyarakat Malaysia yang memberlakukan para TKI dengan semena-mena yang mendapat respon negative dari masyarakat Indonesia. Polisi Malaysia terkenal kejam dan melanggar HAM ketika menagani para TKI yang bermasalah. Perlakuan para aparat hukum Malaysia tersebut karena berpedoman dengan Mou yang ditandatangani di Bali tanggal 13 Mei 2006 dimana mereka boleh melakukan penyitaan paspor buruh yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia<sup>47</sup>. Dikemudian hari jika perlakuan terhadap TKI di Malaysia masih semena-mena maka akan dapat mengganggu hubungan kedua negara.

Salah satu element nasional malaysia adalah angkatan bersenjata. Disamping angkatan bersenjata, Malaysia juga memiliki paramiliter yang saat ini berjumlah 24.000 personil.

**TABEL ANGGARAN PERTAHANAN dan JUMLAH MILITER  
MALAYSIA**

TA	GDP	ANGGRAN HAN	PER CAPITA	ARMY	NAVY	AIR FORCE
2008	US\$ 222 bn	US\$ 4,18 bn	US\$ 8.792			
2009		US\$ 4,03 bn	US\$	<b>80.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>
				☼ <b>50.000</b> ☼ <b>24.000</b>	☼ <b>1.000</b>	☼ <b>600</b>

(Sumber : Military Balance 2010)

☼ Parramiliter

☼ Cadangan

### **Angkatan Darat.**

Angkatan darat Malaysia terbagai dalam :

- 2 mil regions, 1 HQ fd comd, 4 area comd (div), Armd 5 regt, Mech Inf 1 bde (3 mech bn), Inf 9 bde (36 bn), SF 1 bde (3 SF bn), AB 1 bde (10th) (Rapid Deployment Force) (1 lt tk sqn, 1 light arty regt, 3 AB bn) Med Arty 2 regt, Fd Arty 7 regt, MRL 1 regt, ADA 3 regt, Engr 5 regt, Avn 1 hel sqn, Arty Loc 1 regt.
- Perlengkapan :

<sup>47</sup> Wahyu Susilo Masalah Buruh Migran Indonesia Dalam Sidang Dewan HAM ,  
<http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=2&artid=17> 1 Juli 2010

MBT 48 PT-91M *Twardy*, Light Tank 26 *Scorpion*, RECCE 314: 140 AML-60/AML-90; 92 *Ferret* (60 mod); 82 SIBMAS, AIFV 44: 31 ACV300 *Adnan* (*Bushmaster*); 13 ACV300, *Adnan* AGL, APC 835, APC (T) 333: 120 ACV300 *Adnan*, 77 variants; 25 FV4333, *Stormer*; 98 K-200A, 13 variants, APC (W) 502: 452 *Condor* (incl variants); 50 LAV-150 *Commando*.

Artillery 436 (TOWED 164: 105mm 130 Model 56 pack howi'er 155mm 34: 12 FH-70; 22 G-5).

MRL 18 *ASTROS II* (equipped with 127mm SS-30).

MOR254 (81mm SP 14: 4 K281A1; 10 ACV-300; 120mm 8 ACV-S 81mm: 232)

**Anti Tank** SP 8 ACV300 *Baktar Shikan*, MANPATS 60, 18 AT-7 9K115 *Saxhorn*; 24 *Eryx*; 18 *Baktar Shihan* (HJ-8); METIS-M; C90-CRRB RCL 260: 84mm 236 *Carl Gustav*; 106mm 24 M-40 RL 73mm 584 RPG-7 *Knout*

AMPHIBIOUS • LCA 165 *Damen* Assault Craft 540 (capacity 10 troops)

**HELICOPTERS** • UTL 20: 9 SA-316B *Alouette III*; 11 A109.

**AD SAM** 15 *Jernas* (*Rapier 2000*) **MANPAD** 48+: 48 *Starburst*; *Anza*; SA-18 *Grouse* (*Igla*) **GUNS** • **TOWED** 60: **35mm** 24 GDF-005; **40mm** 36 L40/70

### Angkatan Laut.

Markas besar angkatan laut terletak di Lumut dengan 3 regional Command (Kinabalu, Langkawi dan Kuantan). Angkatan laut Malaysia dilengkapi dengan :

- SUBMARINES SSK 2 *Tunku Abdul Rahman* (*Scorpena*) each with 6 single 533mm TT for WASS *Black Shark* LWT (2nd vessel expected ISD 2010)
- PRINCIPAL SURFACE COMBATANTS 12 terdiri dari FRIGATES 2 dan CORVETTES 10.
- PATROL AND COASTAL COMBATANTS 14.
- PFC 6 *Jerong* (Lurssen 45).
- AMPHIBIOUS CRAFT 115 LCM/LCU.
- LOGISTICS AND SUPPORT 9.
- HELICOPTERS ASW/ASUW 6 *Lynx* Srs300 *Super Lynx* UTL 6 AS-555 *Fennec*.

### Angkatan Udara.

Angkatan Udara Malaysia dilengkapi dengan :

- 1 Sqn MiG-29N/MiG-29NUB *Fulcrum* (to be withdrawn from service), FGA 1 sqn with F/A-18D *Hornet*; 1 sqn with Su-30MKM; 2

sqn with *Hawk* MK108; *Hawk* MK208, FGA/Recce 1 sqn with F-5E *Tiger II*/F-5F *Tiger II*; RF-5E *Tigereye*

- Maritime surveillance 1 sqn with Beech 200T.
- Transport 2 sqn with KC-130H *Hercules* (tkr); C-130H *Hercules*; C-130H-30 *Hercules*; Cessna 402B (2 modified for aerial survey); 1 (VIP) sqn with B-737-700 BBJ; 1 Airbus A319CT; BD700 *Global Express*; F-28 *Fellowship*; *Falcon* 900; S-61N; S-70A *Black Hawk*; A-109; 1 sqn with CN-235.
- Training school with MB-339A/C; MD3-160; PC-7/ PC-7 MK II *Turbo Trainer*; SA-316 *Alouette III*.
- Helicopter 4 (tpt/SAR) sqn with S-61A-4 *Nuri*; S-61N, S-70A *Black Hawk*
- SAM 1 sqn with *Starburst*

(Sumber data dari Military Balance 2010)

Malaysia saat ini tengah tumbuh sebagai Negara maju yang ditandai dengan pembangunan ekonomi dan militer yang kuat. Malaysia juga memegang peranan yang penting dalam keamanan Regional terutama dalam keamanan selat Malaka dan Laut China Selatan. Untuk menjaga keamanannya, Malaysia membangun Angkatan Udara dan Laut yang kuat.

#### 4.1.3. Singapura.

Singapura menjadi negara merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965 dimana sebelumnya bersama-sama Sabah dan Sarawak membentuk negara Malaysia. Pada bulan September ditahun yang sama Singapura secara resmi bergabung kedalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak, kemerdekaannya Singapura telah berhasil lolos dari belenggu hegemoni dan standar hidup mereka telah meningkat secara drastis. Saat ini, Singapura berada di daftar teratas bagi wisatawan yang mencari surga di bumi. Investasi langsung asing meningkat dan peningkatan minat untuk memenuhi standar industri internasional telah merubah Singapura menjadi pusat daerah industri, pos perdagangan, pendidikan, urbanitas dan modernitas. Singapura hari ini membanggakan keunggulan fasilitasnya yang

mengundang banyak orang datang dari berbagai negara. Berdasarkan peringkat GDP, Singapura adalah negara ke 5 termakmur di dunia<sup>48</sup>.

Pada tahun 2009 perekonomian Singapura mengalami berkontraksi sebesar 3,6%, hal ini menurut survey yang dilakukan oleh Monetary Authority of Singapore. Hal ini berakibat pada GDP yang akan mengkerut 3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi resesi ini yang paling buruk sejak kemerdekaannya di tahun 1965<sup>49</sup>. Karena ekonomi menjadi komponen utama dari nasional power Singapura, maka krisis ekonomi 2009 sangat berpengaruh terhadap negara Singapura.

Seperti Malaysia, Singapura juga mempunyai riwayat konfrontasi dengan Indonesia pada era tahun 1960an. Konflik regional peninggalan perang dingin saat ini telah diubah kedalam kerjasama Regional ASEAN. Walaupun kerjasama para anggota ASEAN berjalan dengan baik, Singapura masih menyisakan masalah *Military Training Area* (MTA) dan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Adapun Profil Angkatan Bersenjata Singapura adalah sebagai berikut :

**TABEL ANGGARAN PERTAHANAN dan JUMLAH MILITER SINGAPURA**

TA	GDP	ANGGRAN HAN	PER CAPITA	ARMY	NAVY	AIR FORCE
2008	US\$ 182 bn	US\$ 7,66 bn	US\$ 39.554			
2009	US\$ 170 bn	US\$ 8,23bn	US\$ 36.454	<b>50.000</b>	<b>9.000</b>	<b>13.500</b>
				☼ <b>300.000</b> ☼ <b>44.000</b>	☼ <b>5.000</b>	☼ <b>7.500</b>

(Sumber : Military Balance 2010)

☼ Cadangan.

☼ Paramiliter

### **Angkatan Darat.**

- Combined Arms 3 div (mixed active/reserve formations) (*each*: 2 inf bde (*each*: 3 inf bn), 1 armd bde, 1 recce bn, 1 AD bn, 1 engr bn, 2 arty bn)

<sup>48</sup> <http://www.aseannewsnetwork.com/singapore/history-indonesian.html>

<sup>49</sup> [http://www.kontan.co.id/index.php/internasional/news/20903/Ekonomi 2009 Perekonomian Singapura Mengkerut 36](http://www.kontan.co.id/index.php/internasional/news/20903/Ekonomi%202009%20Perekonomian%20Singapura%20Mengkerut%2036)

- Rapid Reaction 1 div (mixed active/reserve formations) (1 amph bde (3 amph bn), 1 air mob bde, 1 inf bde)
- Recce/Lt Armd 4 bn
- IInf 8 bn.
- Cdo 1 bn
- Arty 4 bn
- Engr 4 bn dan MI 1 bn

#### **Angkatan Laut.**

- Submarines SSK 4.
- Principal Surface Combatants 12 terdiri dari Frigates FFGHM 6 dan CORVETTES FSG 6 .
- Patrol and Coastal Combatants 23 PCO 11 *Fearless* each with 2 *Sadral* sextuple each with *Mistral* SAM, 1 76mm gun
- Mine Warfare Mine Countermeasures MHC 4 *Bedok*
- Amphibious LST 4 *Endurance* each with 2 twin (4 eff.) each with *Mistral* SAM, 1 76mm gun with hel deck (capacity 2 hel; 4 LCVP; 18 MBT; 350 troops)

#### **Angkatan Udara.**

- AIRCRAFT 104 combat capable FGA 99: 2 F-15SG (22 more to be delivered by 2012) 60 F-16C *Fighting Falcon*/F-16D *Fighting Falcon* (incl reserves); 28 F-5S *Tiger II*; 9 F-5T *Tiger II*.
  - MP 5 F-50 *Maritime Enforcer*
  - AEW 4 E-2C *Hawkeye*
  - TKR 9: 4 KC-130B *Hercules* (trk/tpt); 1 KC-130H *Hercules* 4 KC-135R *Stratotanker*
  - TPT 9: 5 C-130H *Hercules* (2 *ELINT*); 4 F-50.
  - TRG 41: 27 S-211; PC-21; 10 TA-4SU; 4 A-4SU
  - HELICOPTERS ATK 12 AH-64D *Apache* SPT 40: 18 AS-332M *Super Puma* (incl 5 SAR); 10 CH-47SD *Super D Chinook*; 12 AS-532UL *Cougar* TRG 12: EC-120B *Colibri* (leased); 6+ CH-47D *Chinook*
  - UAV some *Hermes* 450; 40 *Searcher* MK II.
  - MSL • TACTICAL ASM: AGM-45 *Shrike*; *Hellfire*; AGM-65B/G *Maverick*, AGM-84 *Harpoon*; AM-39 *Exocet* AAM AIM-120C *AMRAAM* in store (US); AIM-7P *Sparrow*; AIM-9N *Sidewinder*/AIM-9P *Sidewinder*
  - Air Defence Group Menggunakan Meriam Orlikon, MIM-23 Hawk, LORADS, Rapier, Blind fire, RBS-70, Mistar, dan SA-18 Iгла.
- (Seluruh data diambil dari Military Balance 2010)

Kemajuan pembangunan ekonomi Singapura telah membuat negara tersebut menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Untuk mengamankan jalur-jalur perdagangannya, Singapura membangun Angkatan Bersenjata yang sangat kuat terutama Angkatan Udaranya.

#### 4.1.4. **Thailand.**

Thailand adalah satu-satunya negara dikawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Asing. Pemerintahan Thailand berbentuk Monarki Konstitusional dimana Raja dianggap sebagai pelindung agama Budha. Perekonomian Thailand pernah mengalami guncangan pada tahun 1998 tetapi mulai tahun 2001 pertumbuhan ekonominya mulai meningkat kembali. Ekonomi Thailand bergantung pada ekspor, dengan nilai ekspor sekitar 60% PDB. Kepulihan Thailand dari Krisis Finansial Asia pada 1997-1998 banyak tergantung permintaan luar dari Amerika Serikat dan pasar asing lainnya.

Politik dalam negeri Thailand banyak ditandai dengan terjadinya kudeta oleh Militer. Setelah kudeta 2006 Pemerintah Thailand mengatakan pemilihan umum pada tanggal 23 Desember 2007. Pemilu ini dilakukan setelah referendum yang menyepakati konstitusi baru yang disusun oleh pemerintah sementara. Hasil pemilu tersebut membuat partai Thai Rak Thai (TRT), yang merupakan partai mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra kalah dan digantikan oleh Partai Kekuatan Rakyat dan politisi veteran sayap kanan pimpinan Samak Sundaravej menjadi ketua partai tersebut. Meski Thaksin tetap mendapatkan dukungan rakyat miskin di utara dan barat laut Thailand, namun partai TRT tidak akan mendapatkan cukup suara<sup>50</sup>.

Disamping gejolak politik dalam negeri, Thailand juga masih menyisakan konflik Internal di daerah Thailand Selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Konflik internal ini terjadi karena adanya sekelompok masyarakat Thailand selatan yang beragama Muslim yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat yang mayoritas beragama Budha. Sampai saat ini konflik di Thailand selatan belum sepenuhnya selesai. Konflik internal di Thailand Selatan

---

<sup>50</sup> <http://www.forum-politisi.org/special/article.php?id=555>

dapat mempengaruhi keamanan regional terutama berhubungan dengan isu Terorisme.

Angkatan bersenjata Thailand sebagai salah satu element national power memegang peranan penting dalam stabilitas nasional negara tersebut. Adapun Profil angkatan bersenjata Thailand dapat dilihat sebagai berikut :

**TABEL ANGGARAN PERTAHANAN dan JUMLAH MILITER THAILAND**

TA	GDP	ANGGRAN HAN	PER CAPITA	ARMY	NAVY	AIR FORCE
2008	US\$ 273 bn	US\$ 4,29 bn	US\$ 4.168			
2009	US\$ 259 bn	US\$ 5,13 bn	US\$ 3.927	<b>190.000</b>	<b>69.860</b>	<b>46.000</b>
				☼ <b>200.000</b> ⚔ <b>45.000</b>		

(Sumber : Military Balance 2010)

☼ Pasukan Cad

⚔ Paramiliter

**Angkatan Darat.** Angkatan darat Thailand terdiri dari Armd Air Cav 1 regt (3 air mob coy), Rapid Reaction 1 force (1 bn per region forming), Cav 2 div; 1 indep regt, Recce 4 coy, Mech Inf 2 div, Armd Inf 3 div, Inf 8 indep bn, SF 2 div, Lt Inf 1 div, Arty 1 div, ADA 1 div (6 ADA bn), Engr 1 div, Hel some flt, Economic development 4 div. Mereka diperlengkapi dengan :

- MBT 333, LTK 515, RECCE 32, APC 950.
- ARTY 2,473.
- MRL 130mm Type-85 (reported), MOR 1,900.
- AIRCRAFT, RECCE 40 Cessna O-1A *Bird Dog* TPT 10: 2 Beech 1900C; 2 Beech 200 *Super King Air*; 2 CASA 212 *Aviocar*; 2 *Jetstream* 41; 2 Short 330UTT UTL 10 U-17B
- HELICOPTERS ATK 5 AH-1F *Cobra* SPT 6 CH-47D *Chinook* UTL 159: 65 AB-212 (Bell 212)/Bell 206 *JetRanger*/Bell 214/Bell 412 *Twin Huey*; 92 UH-1H *Iroquois*; 2 UH-60L *Black Hawk*
- UAV • RECCE • TACTICAL *Searcher*
- AD • SAM STATIC *Aspide* MANPAD FIM-43 *Redeye*; HN-5A GUNS 202+ SP 54: 20mm 24 M-163 *Vulcan*; 40mm 30 M-1/M-42 SP TOWED 148+: 20mm 24 M-167 *Vulcan*; 37mm 52 Type-74; 40mm 48 L/70; 57mm 24, Type-59 (S-60); 18+non-operational RADAR • LAND AN/TPQ-36 *Firefinder* (arty, mor); RASIT (veh, art)

### Angkatan Laut .

- AIRCRAFT CARRIERS • CVH 1 *Chakri Naruebet* (capacity 9 AV-8A *Harrier*† FGA ac; 6 S-70B *Seahawk* ASW helly)
- Frigates 10 (FFG 8 dan FF 2)
- Corvettes 9.
- Patrol and Coastal Combatants 90.
- Mine Warfare 19.

**Angkatan Udara.** Dilengkapi dengan AIRCRAFT 165 combat capable terdiri dari :

- FTR/FGA 87: 35 F-5E *Tiger II*/F-5F *Tiger II* (32 being upgraded), 2 F-5B (to be replaced by 4 JAS-39C/2 JAS-39D *Gripen* from 2011); 41 F-16A *Fighting Falcon*; 9 F-16B *Fighting Falcon*.
- TPT 57: 1 A-310-324; 1 A-319CJ; 1 B-737-200; 2 B737-400; 6 BAe-748; 9 Basler *Turbo-67*; 2 Beech 200 *Super King Air*; 2 Beech 65 *Queen Air*; 1 Beech E90 *King Air*; 7 C-130H *Hercules*; 5 C-130H-30 *Hercules*; 3 G-222; 3 IAI-201 *Arava*; 2 *Learjet* 35A; 3 Rockwell *Commander* 500; 9 SA-226AT *Merlin IV/IVA*.
- UTL 40: 22 AU-23A *Peacemaker*\*; 18 GAF N-22B *Nomad*
- TRG 123: 10 *Alpha Jet*\*; 29 CT-4B/E *Airtrainer*; 3 Cessna 150; 46 L-39ZA/MP *Albatros*\*; 23 PC-9; 12 T-41D *Mescalero*
- HELICOPTERS SPT 19: 3 AS-332L *Super Puma*; 3 AS-532A2 *Cougar MKII*; 13 Bell 212 UTL 28: 6 Bell 206B *JetRanger II*; 2 Bell 412 *Twin Huey*; 20 UH-1H *Iroquois*

(Sumber data dari Military Blance 2010)

Thailand saat ini sedang dilanda masalah dalam negeri baik politik maupun ancaman separatis tetapi Thailand memiliki Angkatan Bersenjata yang kuat. Hal itu ditandai dengan peremajaan alutsista Udara dan pembangunan Angkatan lautnya.

#### 4.1.5 Vietnam.

Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di Semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya dan di sebelah timur terbentang Laut China Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Pemerintah Vietnam telah melakukan pembangunan ekonomi negara tersebut sehingga pertumbuhan

ekonominya cukup tinggi. Vietnam termasuk di dalam grup ekonomi "*Next Eleven*"; dimana GDP Vietnam tumbuh sebesar 8.17% pada tahun 2006, negara dengan pertumbuhan tercepat kedua di Asia Timur dan pertama di Asia Tenggara. Pada akhir tahun 2007, menteri keuangan menyatakan pertumbuhan GDP Vietnam diperkirakan mencapai rekor tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir sebesar 8.44%<sup>51</sup>. Keberhasilan pembangunan ekonomi Vietnam tidak terlepas dari bergabungnya negara tersebut kedalam ASEAN pada tahun setelah mengalami keterpurukan selama perang Vietnam.

Politik Vietnam hanya mengenal partai tunggal yaitu partai Komunis Vietnam. Hanya organisasi politik yang bekerjasama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Sejak tahun 1990an negara ini mulai memperkenalkan sistem ekonomi pasar bebas. Meskipun negara tetap secara resmi berjanji kepada sosialisme sebagai doktrinnya, makna ideologi tersebut telah berkurang. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam, menduduki Dewan Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan (*Council National Defense and Security*). Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan, mengepalai kabinet yang terdiri atas 3 deputi perdana menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan perwira-perwira. Seluruh badan pemerintah pemerintah Vietnam secara besar dikontrol oleh Partai Komunis. Mayoritas orang-orang yang ditunjuk Pemerintah adalah anggota-anggota partai. Sekretaris Jendral Partai Komunis adalah salah satu pemimpin politik terpenting di Vietnam dimana mempunyai kewenangan mengontrol organisasi nasional partai dan perjanjian-perjanjian negara, juga mengatur undang-undang.

Vietnam mempunyai beberapa permasalahan perbatasan dengan Indonesia terutama perbatasan laut disekitar Pulau Natuna. Sampai saat ini perjanjian perbatasan tentang tapal batas laut ZEE kedua negara masih belum selesai dirundingkan. Daerah perairan Pulau Natuna yang dipersengketakan merupakan daerah yang kaya akan kandungan minyak dan gas bumi. Jika permasalahan

---

<sup>51</sup> <http://www.aseansec.org/> 12 Januari 2010

perbatasan tidak juga terselesaikan maka dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan kedua negara.

Tentara Rakyat Vietnam (TRV) adalah tentara nasional Vietnam, yang diorganisasikan mencontoh pada organisasi Tentara Pembebasan Rakyat China. TRV lebih jauh lagi dibagi menjadi Angkatan Darat Rakyat Vietnam (termasuk Pasukan Pendukung Strategis dan Pasukan Pertahanan Perbatasan), Angkatan Laut Rakyat Vietnam, Angkatan Udara Rakyat Vietnam serta Penjaga Pantai. Dalam sejarahnya, TRV secara aktif dilibatkan dalam pembangunan Vietnam untuk mengembangkan ekonomi Vietnam. Saat ini, kekuatan TRV mendekati 500.000 tentara. Pemerintah juga mengontrol pasukan cadangan sipil dan kepolisian. Peran militer dalam sektor kehidupan rakyat pelan-pelan dikurangi sejak tahun 1980an.

**TABEL ANGGARAN PERTAHANAN dan JUMLAH MILITER VIETNAM**

TA	GDP	ANGGRAN HAN	PER CAPITA	ARMY	NAVY	AIR FORCE
2008	US\$ 91 bn	US\$ 2,90 bn	US\$ 1.042			
2009	US\$ 94 bn	US\$ 2,80 bn	US\$ 1.061	<b>412.000</b>	<b>13.000</b>	<b>30.000</b>
				<b>‡ 40.000</b>		

(Sumber : Military Balance 2010)

‡ Paramiliter

### **Angkatan Darat.**

Angkatan darat terdiri dari Armd 10 bde, Mech inf 3 div, Inf 58 div (div strength varies from 5,000 to 12,500); 15 indep regt, SF 1 bde (1 AB bde, 1 demolition engr regt), Fd arty 10+ bde, Engr 8 div; 20 indep bde economic construction 10–16 div.

Perlengkapan :

- Tank MBT 1,315, LT TK 620, RECCE 100, AIFV 300 , APC 1,380.
- ARTY 3,040, MRL 710, MOR 82mm; 120mm M-43; 160mm M-43.
- AT • MSL • MANPATS AT-3 9K11 *Sagger* RCL 75mm Type-56; 82mm Type-65 (B-10); 87mm Type-51.

- AD • SAM • MANPAD SA-7 *Grail*/SA-16 *Gimlet*/SA-18 *Grouse (Igla)*  
GUNS 12,000, SP 23mm, ZSU-23-4, TOWED  
14.5mm/30mm/37mm/57mm/85mm/100mm.
- MSL • SSM *Scud-B/Scud-C* (reported).

#### **Angkatan Laut.**

- Submarines SSI 2 DPRK *Yugo*†
- Frigates FF 5, Corvettes FSG 6.
- Patrol and Coastal Combatants 38.
- Mine Warfare MINE COUNTERMEASURES 14.
- AMPHIBIOUS LS 6, LSM 3, LST 3, LST-510-511 (capacity 16 tanks; 200 troops).
- Landing craft 23: 5 LCU; 18 LCM
- Logistic Support 20.

**Angkatan Udara.** Angkatan Udara Vietnam dilengkapi dengan 219 pesawat tempur.

- FTR 140 MiG-21bis *Fishbed L & N*
- FGA 64: 4 Su-30MKK *Flanker*; 7 Su-27SK *Flanker*; 53 Su-22M-3/M-4 *Fi"er* (some recce dedicated).
- ASW 4 Be-12 Mai
- TPT 28: 12 An-2 *Colt*; 12 An-26 *Curl*; 4 Yak-40 *Codling*(VIP)
- TRG 43: 10 BT-6 (Yak-18) *Max*; 18 L-39 *Albatros*; 10 MiG-21UM *Mongol B\**; 5 Su-27UBK *Flanker\**
- Helly ATK 26 Mi-24 *Hind*, ASW 13: 3 Ka-25 *Hormone\**; 10 Ka-28\* (Ka-27PL) *Helix A* SPT 48: 2 KA-32 *Helix C*; 4 Mi-6 *Hook*; 30 MI-17 (Mi-8MT) *Hip H*/Mi-8 *Hip Spt*; 12 UH-1H *Iroquois* SAR 4 PZL W-3 *Sokol*
- AD SAM SP SA-6 *Gainful*, TOWED SA-2 *Guideline*; SA-3 *Goa*  
MANPAD SA-7 *Grail*; SA-16 *Gimlet* GUNS 37mm; 57mm; 85mm; 100mm; 130mm.
- MSL ASM AS-14 *Kedge*; AS-17 *Krypton*; AS-18 *Kazoo*; AS-9 *Kyle* AAM  
AA-10 *Alamo*; AA-12 *Adder*; AA-2 *Atoll*; AA-8 *Aphid*.

(Sumber data dari Military Balance 2010)

Vietnam adalah sebuah negara yang sedang giat melakukan pembangunan setelah perekonomian negara tersebut terpuruk akibat perang yang berlarut-larut. Pembangunan tersebut didukung dengan kondisi politik dalam negeri yang stabil. Pembangunan Vietnam saat ini sedang difokuskan untuk bidang ekonomi sedangkan angkatan bersenjata Vietnam terlibat aktif dalam pembangunan nasional negara tersebut.

#### 4.1.6 China.

Pasca Perang Dingin China tumbuh menjadi negara yang mempengaruhi yang kuat di kawasan Asia Tenggara. Munculnya Cina sebagai kekuatan regional yang tengah tumbuh menjadi kekuatan global menimbulkan berbagai reaksi di kawasan Asia Pasifik. Tidak sedikit pihak di kawasan yang memandang dengan curiga kebangkitan Negeri Tirai Bambu tersebut. Kawasan Asia Tenggara yang merupakan bagian dari Asia Pasifik, dari kaca mata Beijing merupakan wilayah yang *attractive, vulnerable and nearby*. Sejak dekade 1990-an, nilai strategis kawasan ini di mata Cina semakin meningkat, seiring dengan terus tumbuhnya perekonomiannya. Pertumbuhan tersebut bukan saja harus ditunjang oleh ketersediaan pasar, akan tetapi juga harus ditunjang pula oleh lancarnya pasokan energi dari Timur Tengah ke Cina. Tidak aneh bila Beijing sangat perhatian dengan keamanan SLOC di Asia Tenggara, khususnya di Selat Malaka dan perairan Laut China Selatan. Para ahli strategi Cina terus membahas kerentanan Cina akan akses terhadap perairan yang berada jauh di luar wilayahnya. Terkait hal tersebut, Cina kini aktif melakukan pendekatan diplomatik-militer kepada negara-negara Asia Tenggara, khususnya negara-negara yang dilalui oleh SLOC-nya. Pada tahun 2008 karena keberhasilan pembangunan ekonominya, China mulai meningkatkan anggaran belanja Pertahanannya. Hal ini banyak dimaknai oleh negara kawasan sebagai upaya China untuk menyeimbangkan peran militer negara tersebut terhadap militer Amerika dan negara-negara Asia Tenggara<sup>52</sup>.

Disamping pendekatan dalam dimensi politik dan keamanan, China juga aktif mencari sumber energi untuk menggerakkan pembangunan nasionalnya. Pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat menuntut pemakaian energi yang semakin besar. Pesatnya pertumbuhan ekonomi juga mendorong peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingginya ketergantungan terhadap impor energi dan tuntutan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, membuat China mencoba beragam cara untuk mengamankan kepentingannya. Keamanan energi pun menjadi salah satu sektor vital bagi China seperti yang

---

<sup>52</sup> Dr John Chipman, Press Statement Military Balance 2009, Januari 2009

tercantum dalam Buku Putih Keamanan China tahun 2008<sup>53</sup>. Kawasan Asia Tenggara yang stabil akan sangat membantu keamanan suply energy tersebut.

Diplomasi energy China juga merambah Indonesia karena China melihat negara ini kaya akan sumberdaya alam. Pemerintah China turut serta dalam pembangunan sektor infrastruktur di bidang energi listrik di Indonesia yang ditandai dengan pertemuan antara Presiden SBY dengan Presiden China Hu Jintao dalam acara APEC di Singapura<sup>54</sup>. Investasi listrik Cina di Indonesia meliputi PLTU Indramayu senilai \$592 juta yang baru selesai 71% dan Bank of China akan segera mencairkan dana dan akan operasional September 2009. Sementara itu PLTU Suralaya dan Paiton baru selesai 64% dengan total harga proyek masing-masing \$615 juta akan segera dicairkan oleh China Exim Bank. Yang terakhir PLTU Rembang yang didanai oleh China Development Bank \$262 juta<sup>55</sup>. Diplomasi energy yang lakukan China terhadap kawasan Asia Tenggara menunjukkan pentingnya kawasan tersebut terhadap kelangsungan pembangunan Nasional China. Untuk itulah China saat ini mengembangkan Angkatan Bersenjata yang kuat agar mampu dihadirkan dalam kawasan yang sangat vital tersebut.

TABEL ANGGARAN PERTAHANAN dan JUMLAH MILITER CHINA

TA	GDP	ANGGRAN HAN	PER CAPITA	ARMY	NAVY	AIR FORCE
2005	US\$ 2,33 tr	US\$ 29,9 bn				
2006	US\$ 2,68 tr	US\$ 35,1 bn				
¥2007	US\$ 3,43 tr	US\$ 44,94bn	US\$ 3.367			
2008	US\$ 4,42 tr	US\$ 60,1bn	US\$ 3.324			
2009	US\$ 4,86 tr	US\$ 70,3bn	US\$ 3.634	1.600.000	255.000	330.000
				⌘ 660.000		

(Sumber : Military Balance 2010) dan ASIA Balance 2006

⌘ Paramiliter

<sup>53</sup> <http://sylvietanaga.wordpress.com/2009/03/11/china-dan-diplomasi-energi/> 07 Nop 2009.

<sup>54</sup>

[http://www.tvone.co.id/berita/view/27542/2009/11/14/china\\_akan\\_investasi\\_di\\_bidang\\_infrastruktur\\_listrik/](http://www.tvone.co.id/berita/view/27542/2009/11/14/china_akan_investasi_di_bidang_infrastruktur_listrik/) 07 Nop 2009

<sup>55</sup> <http://www.indoflyer.net/content.asp?contentid=29781> 17 Nop 2009

## Profil Angkatan Bersenjata China :

### Angkatan Laut.

- SUBMARINES (65) yang dilengkapi dengan 3 SSBN (1 *Xia* equipped with 12 JL-1 (CSS-N-3) strategic SLBM dan 2 *Jin* equipped with up to 12 JL-2 (CSS-NX-4) strategic.) dan 62 kapal selam berbagai type dari Type Han , Shang, Kilo, Romeo, Song, Yuan dan Ming.
- Principal Surface Combatan 80.
- Destroyers DDG 28
- FRIGATES FFG 52.
- Patrol and and Coastal Combatan 253.
- Mine Warfare 69.
- Amphibious. PRINCIPAL AMPHIBIOUS VESSELS • LPD 1 *Yuzhao* (Type 071), (capacity 4 ACV plus supporting vehicles;500 – 800 troops; 2 hel

### Strategic Missile Forces :

- MSL • STRATEGIC 442 ICBM 66: '12 DF-31 (CSS-9) (1 bde); '24 DF31A (CSS-9 Mod 2) (2 bde); '10 DF-4 (CSS-3) (1 bde); 20 DF-5A (CSS-4 Mod 2) (3 bdes).
- IRBM 118: '80 DF-21 (CSS-5) (5 bde); '36 DF21C (CSS-5 Mod 3) (2 bde); '2 DF-3A (CSS-2 Mod) (1 bde)
- SSRBM 204 108 DF-11A/M-11A (CSS-7 Mod 2) (4 bde); 96 DF-15/M-9 (CSS-6) (6 bde)
- LACM '54 CJ-10 (DH-10); (2 bde).

### Angkatan Udara.

- Bomber 4 regt with H-6E/H-6F/H-6H (of which some with YJ-63 cruise missile); 1 (nuclear ready) regt with H-6 (Tu-16) *Badger*.
- Fighter 2 regt with J-7 *Fishbed*; 8 regt with J-7B *Fishbed*; 2 regt with J-7H *Fishbed*; 2 regt with J-7C *Fishbed*; 1 regt with J-7D *Fishbed*; 6 regt with J-7E *Fishbed*; 2 regt with J-7G *Fishbed*; 1 regt with J-8 *Finback*; 2 regt with J-8A *Finback*; 1 regt with J-8A/J-8E *Finback*; 4 regt with J-8B *Finback*; 1 regt with J-8B/J-8D *Finback*; 1 regt with J-8D *Finback*; 2 regt with J-8H *Finback*; 1 regt with J-8F *Finback*; 8 regt with J-11 (Su-27SK)/J-11B *Flanker* FGA 3 regt with Su-30MKK *Flanker*; 5 regt with Q-5/Q-5D/Q-5E *Fantan*; 5 regt with J-10; 3 regt with JH-7/7A.
- Intai 3 regt with JZ-6 (MiG-19R); 1 regt with JZ-8 *Finback*; 1 regt with JZ-8F *Finback*
- EECM 1 regt with Y-8D
- AEW/AWACS 1 regt with KJ-2000/KJ-200
- Transport 2 regt with Il-76MD *Candid B* (to support 15th and 16th Airborne armies); 1 regt with Y-7(An-26), Y-8; 1 regt with Y-7 Tkr 1 regt with H-6U VIP 3 regt with Il-76MD, Tu-154M, B-737-200, Y-8, An-30.

- Air Defence Terdiri dari berbagai battery SAM yang tersebar diseluruh wilayah daratan China.
- Helly 1 regt with Mi-171, Z-8 (SA-321). Some regts with AS-332 *Super Puma* (VIP); Mi-8 *Hip*; Z-9 (AS-365N) *Dauphin 2*; Bell 214.

### **Angkatan Darat.**

Angkatan Darat China disebar dalam beberapa sektor diantaranya North East–Shenyang(250,000), North–Beijing (300,000), West–Lanzhou (220,000), East–Nanjing (250,000), Centre–Jinan (190,000), South–Guangzhou (180,000) dan South-West–Chengdu (180,000). Pasukan darat China diperlengkapi dengan :

- Tank MBT 6.550, Light Tank 1.000, APC 2.500.
- Artelery 17.700 terdiri dari berbagai kaliber 100 mm, 130 mm, 122 mm, 152 mm dan 155 mm.
- GUN/MOR 150: 120mm 150: 100 2S23 *NONA-SVK*; up to 50 PLL-05
- MOR TOWED 81mm Type-W87; 82mm Type-53 (M-37)/Type-67 /Type-82; 100mm Type-71 (reported); 120mm Type-55 (incl SP); 160mm Type-56 (M-160)
- Anti Tank MSL 7,200.
- HELICOPTERS **ATK** 126 **SAR** 7 SA-321 *Super Frelon* **SPT** 278, **UTL** 88
- **UAV** ASN-15 (hand-launched); ASN-104; ASN-105; ASN-206; W-50; WZ-5; D-4 NPU (Xian NPU); WZ-6 *BZK-006*
- AD, SAM 290, **SP** 290: 200 HQ-7A; 60 SA-15 *Gauntlet (Tor-M1)*; 30 HQ-6D *Red Leader*.
- Radar **LAND** *Cheetah*; RASIT; Type-378 **MSL** • **SSM** HY-1 (CSS-N-1) *Silkworm*; HY-2 (CSS-C-3) *Seersucker*; HY-4 (CSS-C-7) *Sadsack* ; YJ-62C (C-602C)

(Sumber data dari Military Balance 2010)

Pembangunan ekonomi China yang terus meningkat telah menghasilkan kemakmuran pada negara tersebut. China tumbuh sebagai kekuatan dunia yang baru dan menjadi pesaing utama kepentingan Amerika dikawasan Asia Tenggara. Untuk mengamankan tingkat pertumbuhan perekonomiannya, China membangun Angkatan Bersenjata yang kuat dan modern yang mampu dihadirkan diseluruh wilayah termasuk kawasan Asia Tenggara.

#### 4.1.7 Australia.

Australia sebagai salah satu negara maju dan modern di dunia berada pada geografi yang berbatasan secara langsung dengan kawasan ASEAN. Dengan posisi geografi tersebut Australia sangat berkepentingan untuk melihat kawasan di utaranya menjadi kawasan yang stabil sehingga ancaman yang mungkin muncul dari utara akan dapat dibentengi terlebih dahulu oleh ASEAN. Pandangan Australia dapat dilihat pada Strategic Policy nya yang menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Australia merupakan elemen kunci dalam menjaga national Interest Australia. Dalam penjabarannya di Australia's Strategic Environment dengan jelas disebutkan bahwa stabilitas kawasan Asia Pasifik menjadi kunci kepentingan Australia disamping pembangunan ekonomi dikawasan tersebut serta menempatkan Indonesia sebagai elemen penting karena faktor Geographi dan Demographinya<sup>56</sup>.

Interaksi Australia terhadap negara-negara ASEAN tampak pada dunia perdagangan salah satunya Indonesia dimana neraca Perdagangan Non Migas antara Indonesia dengan Australia pada 2008 hingga Oktober menunjukkan posisi minus sebesar US\$ 1,6 miliar. Impor Australia ke Indonesia sebesar US\$ 3,4 miliar, sedangkan ekspor nonmigas Indonesia ke Australia mencatat nilai US\$ 1,8 miliar. Dibandingkan pada 2007, impor Australia ke Indonesia meningkat 45 persen dari sebelumnya yakni US\$ 2,3 miliar. Adapun nilai ekspor hanya meningkat 14 persen dari sebelumnya US\$ 1,6 miliar. Indonesia sebagai negara berpenduduk 230 juta jiwa merupakan pasar terbesar di antara negara anggota kawasan regional ASEAN<sup>57</sup>. ASEAN yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan serta tidak adanya konflik diantara sesama anggotanya akan membuat National Interest Australia menjadi mudah tercapai.

Pada masa lalu Australia pernah mempunyai sejarah yang kurang bersahabat dengan Indonesia bahkan menjurus kekonflik bersenjata. Konflik

<sup>56</sup> Strategic Policy, Australia Maritime Doctrine  
[http://www.navy.gov.au/Publication:Australian\\_Maritime\\_Doctrine](http://www.navy.gov.au/Publication:Australian_Maritime_Doctrine)

<sup>57</sup> [http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2009/02/23/brk,20090223-161638\\_id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2009/02/23/brk,20090223-161638_id.html) 03 Sept 2009

Trikora, Dwikora dan yang terakhir peristiwa lepasnya Timor-timur membuat hubungan kedua negara menjadi tegang. Keberadaan Indonesia dipersilangkan jalur pelayaran strategis, memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara. Karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya, sangat kuatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan angkatan laut dan udara, yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran dan penerbangan diatas Nusantara. Kondisi hubungan kedua negara berangsur membaik sejalan dengan era kepemimpinan Presiden Yudhoyono yang ditandai dengan seringnya pertemuan antar kedua pemimpin negara tersebut.

Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force/ADF) adalah unsur kunci dalam melindungi kepentingan nasional Australia. Karakteristik strategis Australia berarti bahwa kemampuan kekuatan Maritim/bahari adalah dasar keberhasilan ADF dalam melaksanakan peranannya<sup>58</sup>. Pemerintah Australia mempercayai bahwa kondisi geografis Australia yang dikelilingi lautan dan berada pada kawasan Asia Tenggara memerlukan kekuatan Laut yang didukung Angkatan Udara yang kuat untuk dapat berinteraksi dikawasan tersebut. Kekuatan-kekuatan Maritim/bahari adalah hal penting untuk melaksanakan Strategi Militer Australia<sup>59</sup>. Dari pemahaman diatas tampak bahwa angkatan bersenjata Australia terfokuskan pada pengembangan kekuatan maritim yang disesuaikan dengan kondisi geografis Australia.

TABEL ANGGARAN PERTAHANAN dan JUMLAH MILITER AUSTRALIA

TA	GDP	ANGGRAN HAN	PER CAPITA	ARMY	NAVY	AIR FORCE
2008	US\$ 992 bn	US\$ 23,2bn	US\$ 47,242			
2009	US\$ 1,119bn	US\$ 26,4bn	US\$ 52,632	<b>27.461</b>	<b>13.230</b>	<b>14.056</b>
				☼ 15.315	☼ 2.000	☼ 2.600

(Sumber : Military Balance 2010)

<sup>58</sup> Australian Maritime Doctrine, RAN Doctrine 2000 chapter IV

<sup>59</sup> Sean Costello and Andrew Davies Australian strategic Policy Institute, How to buy a submarine Defining and building Australia's future fleet, Oktober 2009

**Kekuatan Angkatan Laut :**

- 6 Kapal Selam kelas collins dilengkapi Harpon.
- 12 Frigate dilengkapi Peluru kendali Harpon.
- 14 Kapal Patroli.
- 2 Kapal pendarat dengan kemampuan 4 Helly UH-60 Black Hawk, 3 MK-50A Seaking dan 450Pasukan.
- 6 LCH dengan kemampuan 3 MBT dan 13 APC.

**Kekuatan Angkatan Udara :**

- Intai 4 RF-111 C Aardvark.
- FGA 71: 55 F/A-18A *Hornet*; 16 F/A-18B *Hornet*.
- BBR 15: 15 F-111C *Aardvark*.
- LIFT 33 *Hawk* Mk127.
- MP 19 AP-3C *Orion*.
- AWACS 6 B-737 *Wedgetail*
- TPT 33: 4 C-17 *Globemaster*; (5 KC-30B MRTT being delivered); 2 B-737 BBJ (VIP); 12 C-130H *Hercules*; 12 C-130J *Hercules*; 3 CL-604 *Challenger* (VIP)

**Kekuatan Darat :**

MBT 149: 59 M1-A1 *Abrams*; 90 *Leopard*

APC APC (T) 774: 647 M-113A1 (350 to be upgraded to AS3), 119 in store; 8 M-113AS4 (Test)

ARTY 566 TOWED 270: 105mm 234: 109 L-118 Light Gun; 155mm 36 M-198 MOR 81mm 296

AT MSL • MANPATS *Javelin*

AIRCRAFT • TPT 3 Beech 350 B300 (on lease) HELICOPTERS 22 attack helicopters SPT 44: 6 CH-47D *Chinook*; 34 S-70 A-9 (S-70A) *Black Hawk*; 4 MRH-90 TTH (NH-90) (ongoing delivery of 40) UTL 66: 41 Bell 206B-1 *Kiowa* (being replaced by *Tiger*); 20 UH-1H *Iroquois* in store (decommissioned)

UAV 18

AD • SAM 48

MANPAD 30 RBS-70

RADAR • LAND 21: 7 AN/TPQ-36 *Firefinder* (arty, mor);

14 RASIT (veh, arty)

(Sumber data dari Military Balance 2010)

#### 4.1.8. PHILIPINA.

Philipina adalah sebuah negara kepulauan yang terletak disebelah utara Indonesia dan Malaysia. Negara ini terdiri dari 7.107 pulau. Filipina seringkali dianggap sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara di mana pengaruh budaya Barat terasa sangat kuat.

Filipina adalah negara paling maju di Asia setelah Perang Dunia II, namun sejak saat itu telah tertinggal di belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah. Hal itu terjadi karena penyitaan kekayaan yang dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh-pengaruh neo-kolonial. Saat ini Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, yang banyak disumbangkan dari pengiriman uang oleh pekerja-pekerja Filipina di luar negeri.

Saat ini Philipina menghadapi beberapa masalah besar diantaranya gerakan separatis muslim di sebelah selatan Mindanao, pemberontak-pemberontak dari Tentara Rakyat Baru (*New People's Army*) yang beraliran komunis di wilayah-wilayah pedesaan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering tidak konsisten, tingkat kejahatan yang makin meningkat, dan kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan dan polusi laut. Filipina juga mengalami masalah tingkat kepadudukan yang padat didaerah perkotaan.

Dalam hubungan Luar Negeri, Philipina mempunyai masalah perbatasan dengan Indonesia, Malaysia dan China dikepulauan Spratly. Pemerintah Philipina sedang berupaya mengatasi permasalahan dalam dan luar negerinya diantaranya dengan menggunakan element militer. Adapun profil militer Philipina dapat dilihat sebagai berikut :

**TABEL ANGGARAN PERTAHANAN dan JUMLAH MILITER  
PHILIPINA**

TA	GDP	ANGGRAN HAN	PER CAPITA	ARMY	NAVY	AIR FORCE
2008	US\$ 168 bn	US\$ 1,42 bn	US\$ 1.758			
2009	US\$ 164 bn	US\$ 1,16 bn	US\$ 1.680	<b>80.000</b>	<b>24.000</b>	<b>16.000</b>
				⚙ 100.000 ⚙ 40.500	⚙ 15.000	⚙ 16.000

(Sumber : Military Balance 2010)

⚙ Cadangan

⚙ Paramiliter

### **Angkatan Darat.**

- 5 Area Unified Comd (joint service), 1 National Capital Region Comd
- Armd 1 Lt armd div with (5 Lt armd bn; 2 Lt armd coy; 3 mech inf bn; 1 armd cav tp; 1 avn bn; 1 cbt engr coy.
- Spec Ops 1 comd (1 Scout Ranger regt, 1 SF regt, 1 Lt reaction bn.
- Lt Inf 10 div (*each*: 1 arty bn, 3 inf bde)
- Arty 1 regt HQ.
- Engr 5 bde
- Presidential Guard 1 gp

### **Angkatan Laut.**

- Principal Surface Combatants Frigates FF 1 *Rajah Humabon* with 3 76mm gun.
- Patrol Coastal Combatants 62.
- Amphibious LST 7.
- CRAFT 39: 3 LCU; 6 LCVP; 30 LCM.

### **Angkatan Udara.** Dilengkapi dengan 30 pesawat tempur.

- FAC 15 OV-10 *Bronco*.
- MP 1 F-27 MK 200MPA.
- TPT 17: 2 C-130B *Hercules* (6 in store); 2 C-130H *Hercules*; 4 C-130K *Hercules*; 1 F-27-200 *Friendship*; 1 L-100-20 in store; 1 Rockwell *Turbo Commander* 690A. UTL 4: 2 Cessna 210 *Centurion*; 1 GAF N-22B; 1 GAF N-22SL *Nomad*.
- TRG 44: 15 Augusta S-211\*; 6 R172 *Hawk* XP; 12 SF-260TP; 11 T-41D *Mescalero*; 18 SF-260F\* being delivered by end 2010.
- Helly ASLT 25: 5 AUH-76; 20 MD-520MG SPT 2: 1 S-70 A-5 (S-70A) *Black Hawk*; 1 SA-330L *Puma* UTL 79: 6 AB-412SP *Griffon*; 6 Bell 412EP *Twin Huey*/Bell 412SP *Twin Huey*; 40 UH-1H *Iroquois*; 27 UH-1M *Iroquois*.
- UAV 2 *Blue Horizon II*.

- MSL • AAM AIM-9B *Sidewinder*.  
(Sumber data dari Military Balance 2010)

Secara umum Philipina masih memiliki masalah politik dalam negeri dan pemberontakan bersenjata yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Angkatan Bersenjata Philipina digunakan untuk mencapai national interest negara tersebut terutama pengamanan kedaulatan dan mengatasi pemberontakan. Angkatan bersenjata Philipina belum dibangun sesuai kebutuhan.

Dari perkembangan geopolitik kawasan tampak bahwa negara-negara kawasan membangun angkatan bersenjata terutama dengan perlengkapan ofensif seperti pesawat tempur canggih dan kapal selam

#### 4.2. Kebijakan pertahanan Pemerintah Indonesia.

##### 4.2.1 Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008<sup>60</sup>.

Kebijakan pertahanan Pemerintah Indonesia secara kebijakan strategis dapat dilihat didalam Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Buku putih ini berisi segala sesuatu yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan fungsi pertahanan negara. Keamanan nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategisnya yang mencakup kondisi keamanan global, kondisi keamanan Regional dan kondisi keamanan dalam negeri. Adapun trend keamanan Global yang berpengaruh saat ini adalah :

- **Terorisme.** Sejak peristiwa 11 September 2001, Terorisme telah dianggap sebagai ancaman nyata bagi keamanan global saat ini. Terorisme sebagai ancaman nyata, mengancam jiwa manusia dan mengancam kehormatan negara. Meskipun terorisme menjadi ancaman global, tetapi tiap-tiap negara mempunyai penanganan yang berbeda terutama dalam menggunakan instrument militer.
- **Isu senjata pemusnah massal.** Masih terdapatnya negara negara yang berusaha mengembangkan dan memiliki senjata nuklir

---

<sup>60</sup> PERMENHAN RI No :PER/03/M/II/2008 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Dephan RI , Jakarta Februari 2008.

menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan senjata tersebut yang dapat berakibat terjadinya maalapetaaka bagi keamanan global. Indonesia memiliki komitmen untuk menentang setiap usaha proliferasi senjata pemusnah massal, yang sejalan dengan komitmen untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir.

- **Peningkatan kebutuhan energy dunia serta dampaknya terhadap keamanan global.** Kebutuhan dunia akan energy minyak dan gas bumi yang terus meningkat, sementara ketersediaan semakin terbatas, berimplikasi secara politik, ekonomi dan keamanan. Demikian juga dengan Indonesia, kenaikan harga minyak bumi membawa dampak terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan.
- **Ancaman keamanan lintas negara.** Kondisi keamanan global diwarnai dengan meningkatnya intensitas ancaman keamanan asimetris dalam bentuk ancaman keamanan lintas negara. Ancaman keamanan lintas negara tersebut berbentuk aksi perompakan, penyelundupan senjata dan bahan peledak, penyelundupan manusia, imigran gelap, pembalakan liar, narkoba, perdagangan manusia serta pencurian ikan. Bagi Indonesia ancaman keamanan lintas negara sangat merugikan kepentingan nasional.
- **Bencana alam.** Bencana Alam menjadi isu internasional jika menimbulkan korban yang sangat besar. Masyarakat Internasional dapat melakukan intervensi atas nama kemanusiaan jika sebuah negara tidak mampu mengatasi sendiri dampak dari bencana alam tersebut. Posisi geografis Indonesia yang berada pada cincin gunung berapi dan pertemuan sejumlah lempeng bumi rawan akan terjadinya bencana alam. Kondisi ini mempengaruhi kebijakan pertahanan negara, baik penyiapan kekuatan maupun logistik dan prosedur penggunaan kekuatan.

Trend kondisi keamanan Regional yang mempengaruhi keamanan Indonesia diantaranya :

- **Konflik Eksternal dan Internal.** Salah satu isu keamanan regional yang masih mengemuka adalah konflik antarnegara yang berkaitan dengan klaim teritorial. Demikian juga dengan kawasan laut China Selatan yang masih menyimpan potensi konflik antar negara-negara yang mendiami kawasan tersebut. Disamping konflik antar negara, konflik dalam negeri yang berdimensi vertikal dan horizontal dapat juga mempengaruhi keamanan kawasan seperti isu terorisme, konflik komunal, isu separatisme dan konflik lokal lainnya.
- **Keamanan Maritim.** Lalu lintas perdagangan dunia yang menggunakan jalur maritim semakin memegang peranan yang penting saat ini. Hal ini membuat isu keamanan maritim menjadi krusial bagi banyak negara. Selat Malaka yang berada pada kawasan Asia Tenggara menjadi fokus masyarakat Internasional karena lalu lintas lautnya yang sangat padat. Posisi strategis tersebut telah mendorong keinginan negara-negara kuat untuk ikut terlibat dalam pengamanan selat Malaka yang mana bertentangan dengan kedaulatan negara pantai. Selat Malaka yang aman menjadi syarat kunci untuk menghindari campur tangan negara diluar kawasan.

Sedangkan kondisi keamanan dalam negeri yang berpengaruh terhadap keamanan nasional diantaranya :

- **Nasional.** Isu menonjol dalam bidang pertahanan diantaranya adalah Isu Perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, Separatisme, terorisme, radikalisme yang anarkis, konflik komunal, bencana alam dan kondisi politik pasca reformasi.
- **Provinsial.** Otonomi daerah tidak semuanya dapat berjalan dengan baik karena kurang siapnya daerah mengelola daerahnya. Isu yang cukup menonjol adalah tata ruang wilayah yang masih simpang siur yang pada akhirnya menimbulkan gejolak dimasyarakat.

- **Lokal.** Hal yang menonjol selama era globalisasi adalah menguatnya identitas lokal menyikapi pemberlakuan otonomi daerah. Kondisi ini sangat kontra produktif dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang dapat menyulut konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras dan antar golongan, serta antar kepentingan.

Dari pengarang lingkungan Lingkungan Keamanan Strategis tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemhan merumuskan hakekat dan menggolongkan ancaman bagi Indonesia sebagai berikut :

- **Ancaman Militer.** Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer berupa Agresi, Pelanggaran Wilayah, Pemberontakan Bersenjata, Sabotase, Spionase, Aksi Teror Bersenjata, Ancaman Keamanan Laut dan Udara serta Konflik Komunal.
- **Ancaman Nirmiliter.** Ancaman Nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman Nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi serta keselamatan umum.

#### 4.2.2 Dukungan Anggaran pertahanan.

Penyelenggaraan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah. Selama ini penentuan jumlah anggaran pertahanan banyak didasarkan pada faktor kemampuan keuangan negara dan prioritas pembangunan. Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah 2005-2009 menempatkan bidang pendidikan sebagai prioritas pertama dalam pembangunan nasional, diikuti oleh pembangunan infrastruktur.

## DUKUNGAN ANGGARAN PERTAHANAN TA 2005 S.D 2009

(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Kebutuhan Anggaran	Alokasi Anggaran	% Terhadap Alokasi	% PDB	% APBN	Belanja Pembangunan		Belanja Rutin	
						RP	KE	BEL. PEG	NON BEL. PEG
2005	45.028,34	23.108,10	51,32	1,05	5,81	4.310,96	4.784,52	9.529,04	4.483,58
2006	56.954,77	28.299,18	49,69	0,93	4,36	5.147,40	4.450,52	12.140,60	6.490,66
2007	74.479,60	32.640,06	43,82	0,92	4,27	5.718,20	4.220,51	14.641,17	8.060,18
2008	100.533,68	32.871,00	32,70	0,70	3,32	3.088,50	3.767,54	17.763,54	8.251,42
2009	127.133,59	33.667,62	26,48	0,63	3,25	2.866,4	2.806,00	19.713,88	8.281,34
<b>RATA2</b>	<b>80.826,00</b>	<b>30.117,19</b>	<b>40,80</b>	<b>0,85</b>	<b>4,20</b>	<b>4.226,29</b>	<b>4.005,82</b>	<b>14.757,69</b>	7.113,44

Sumber : Buku Putih Dephan 2008 dan paparan RKA-KL Dephan/TNI 2009

Dari data diatas tampak bahwa anggaran pertahanan Indonesia rata-rata hanya 0,85% dari PDB atau hanya 40,8% dari kebutuhan anggaran yang diperlukan.

### 4.3. Pembangunan TNI AU.

#### 4.3.1 Doktrin.

Pembangunan TNI AU pada periode 2005-2009 menghasilkan buku doktrin baru yang “SWA BHUWANA PAKSA” 2007. Didalam doktrin ini Tugas TNI AU disesuaikan dengan yang diamanatkan dalam UU No 34 tahun 2004. Selain tugas, dalam Doktrin Swa Bhuwana Paksa 2007 juga mencantumkan kemampuan yang ingin dimiliki oleh TNI AU diantaranya :

#### a. Kemampuan Pengendalian Udara (*Control of The Air*).

Kemampuan ini merupakan inti dari kemampuan kekuatan udara. Pengendalian udara merupakan kemampuan untuk menggunakan dimensi ketiga (udara) guna mengendalikan keamanan permukaan maupun dibawahnya tanpa terancam atau diserang, sehingga musuh tidak dapat menggunakan kekuatannya secara efektif.

b. **Kemampuan Serangan Udara (*Air Strike*)**. Kemampuan serangan udara dikembangkan berdasarkan kemampuan penindakan dan penghancuran untuk melancarkan serangan dari udara terhadap sasaran yang ada di udara, laut dan darat.

c. **Kemampuan Dukungan Udara (*Air Support*)**. Kemampuan untuk mendukung pelaksanaan operasi kekuatan darat, laut dan udara yang sedang/akan melaksanakan operasi dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas operasi kawan.

d. **Kemampuan Eksploitasi Informasi**. Kemampuan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan informasi melalui ruang (wahana) dirgantara dalam rangka mendapatkan keunggulan informasi agar tercipta penguasaan udara.

Seluruh kemampuan yang diamanatkan dalam doktrin Swa Bhuwana Paksa 2007 tersebut memerlukan kesiapan alutsista udara yang tinggi dimana untuk kesiapan alutsista memerlukan dukungan anggaran yang memadai.

#### 4.3.2. Anggaran.

Pembangunan kekuatan TNI AU juga tidak terlepas dari besarnya anggaran pertahanan yang mampu disediakan oleh Pemerintah bagi Kementerian Pertahanan. Mabes AU telah berupaya menyusun kebutuhan anggaran bagi pembangunan kekuatan. Kebutuhan anggaran tersebut disusun berdasarkan asumsi kebutuhan Ideal dan Minimal.

#### **Daftar kebutuhan dan Realisasi Anggaran TNI AU 2005-2009**

TA	KEBUTUHAN IDEAL			KEBUTUHAN MINIMAL			REALISASI		
	PEG BRG&JASA	MODAL	JML	PEG BRG&JASA	MODAL	JMLH	PEG BRG&JASA	MODAL	JMLH
2005	16.238.142.807	5.300.000.000	21.538.142.807	5.394.540.000	2.023.710.000	7.418.250.000		1.433.259.731	2.906.731.047
2006	16.493.142.807	5.416.826.061	21.909.968.868	6.608.633.836	1.609.108.658	8.217.742.494	2.061.529.580	1.307.796.634	3.369.326.214

2007	18.142.457.087	6.383.707.099	24.526.164.186	7.269.497.220	1.770.019.524	9.039.516.743	2.349.808.499	1.400.830.524	3.750.639.023
2008	19.956.702.706	7.022.077.809	26.978.780.605	7.966.446.942	1.947.021.476	9.943.468.418	2.633.003.563	572.163.361	3.205.166.924
2009	21.952.373.075	7.724.285.590	29.676.658.665	8.796.091.636	2.141.723.624	10.937.815.260	2.798.515.792	432.624.640	3.231.140.432

(Sumber : Laporan Srenau Asumsi Rata-rata Kenaikan Pertahun TA 2000 s/d PAGU 2010 )

Dari data diatas tampak bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan 2009, jumlah anggaran yang diterima oleh TNI AU tidak pernah sesuai dengan kebutuhan ideal dan kebutuhan minimalnya.

#### PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN PERTAHUN

TA	BEL PEGAWAI	BEL BARANG/JASA (HAR ALUT SISTA)	BEL MODAL (Alutsista)
		2005	669.404.473
2006	997.808.983	1.063.720.597 (316.205.432)	1.307.796.634
2007	1.143.747.979	1.206.060.520 (318.152.144)	1.400.830.524 <b>(799.942.071)</b>
2008	1.359.940.988	1.273.062.575 (339.420.326)	572.163.361 <b>(425.393.147)</b>
2009	1.511.626.547	1.286.889.245 (346.233.777)	432.624.640 <b>(225.423.755)</b>

Sumber :Laporan Srenau ttg Perbandingan Alokasi Anggaran TNI AU TA 2005-2010

Besaran anggaran bagi pemeliharaan maupun pengadaan alut sista TNI AU pada kurun waktu 2005-2009 mengalami peningkatan tetapi besarnya belum terlalu signifikan untuk mencapai postur yang ideal.

#### 4.3.3. Kesiapan Pesawat.

Besarnya dukungan anggran akan berdampak langsung kesiapan pesawat dan produksi jam terbang serta kesiapa jam operasional Radar hanud. Adapun kesiapan pesawat dari tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat terlihat dari alokasi sebagai berikut :

**SASARAN JAM TERBANG DAN SASARAN KESIAPAN  
PESAWAT T.A 2006  
(SASBINPUAN TNI AU 2007 NO : R/2-09/07/I/SOPSAU)**

NO	TYPE PSWT	RENCANA SASBINPUAN TA 2008			ALOKASI JAM TERBANG TA.2008			
		KUAT RIIL	SIR	SAS SIAP	OPS	LAT	DIK	JML
A.	PESPUR	SU-27/30	F-16 A/B	F-5 E/F	MK-53	HAWK-109/209	OV-10	
	Jumlah	73	61	35	1.162:00	11.614:00		12.776:00
B.	PESANG	C-130	B-737	F-28/27	C-212	CN-235		
	Jumlah	51	44	31	12.279:00	6.381:00		18.660:00
C.	PES HELI	SA-330	NAS-332	S-58T	EC-120 B	B-47 G		
	Jumlah	50	43	32	3.285:00	8.425:00		11.710:00
D.	PES LATU	T-34C	AS-202	KT-1 B	T-41 D/R-172K			
	Jumlah	53	40	31		4.530:00	12.470:10	17.000
<b>TOTAL</b>		<b>227</b>	<b>188</b>	<b>129</b>	<b>16.726</b>	<b>30.950</b>	<b>12.470:00</b>	<b>60.146:00</b>

**SASARAN JAM TERBANG DAN SASARAN KESIAPAN  
PESAWAT T.A 2007  
(SKEP KASAU NO SKEP 16/III/2007 Tanggal 15 Maret 2007)**

NO	TYPE PSWT	RENCANA SASBINPUAN TA 2008			ALOKASI JAM TERBANG TA.2008			
		KUAT RIIL	SIR	SAS SIAP	OPS	LAT	DIK	JML
A.	PESPUR	SU-27/30	F-16 A/B	F-5 E/F	MK-53	HAWK-109/209	OV-10	
	Jumlah	75	53	31	1.138:00	11.369:00		12.507:00
B.	PESANG	C-130	B-737	F-28/27	C-212	CN-235		
	Jumlah	52	42	31	12.942:00	6.894:00		19.836:00
C.	PES HELI	SA-330	NAS-332	S-58T	EC-120 B	B-47 G		
	Jumlah	49	41	34	3.780:00	5.215:00	2.000:00	10.995:00
D.	PES LATU	T-34C	AS-202	KT-1 B	T-41 D/R-172K			
	Jumlah	52	46	33		4.048:00	12.222:00	16.270:00
<b>TOTAL</b>		<b>228</b>	<b>182</b>	<b>129</b>	<b>17.860:00</b>	<b>27.526:00</b>	<b>14.222:00</b>	<b>59.608:00</b>

**SASARAN JAM TERBANG DAN SASARAN KESIAPAN  
PESAWAT T.A 2008  
(NO PERKASAU /13/II/2008 Tanggal 28 Maret 2008)**

NO	TYPE PSWT	RENCANA SASBINPUAN TA 2008			ALOKASI JAM TERBANG TA.2008			
		KUAT RIIL	SIR	SAS SIAP	OPS	LAT	DIK	JML
A.	PESPUR	SU-27/30	F-16 A/B	F-5 E/F	MK-53	HAWK-109/209		
	Jumlah	66	48	29	1.134:00	10.898:00		12.032:00
B.	PESANG	C-130	B-737	F-28/27	C-212	CN-235		
	Jumlah	51	42	32	13.579:00	7.066:00		20.645:00
C.	PES HELI	SA-330	NAS-332	S-58T	EC-120 B	B-47 G		
	Jumlah	47	39	33	4.339:00	5.233:00	1.500:00	11.074:00
D.	PES LATU	T-34C	AS-202	KT-1 B	T-41 D/R-172K			
	Jumlah	57	48	35		4.924:00	11.845:10	16.769:10
<b>TOTAL</b>		221	177	129	19.052:00	28.123:00	13.345:10	60.520:10

**SASARAN JAM TERBANG DAN SASARAN KESIAPAN  
PESAWAT T.A 2009  
(NO PERKASAU /15/II/2009 Tanggal 27 Pebruari 2009)**

NO	TYPE PSWT	RENCANA SASBINPUAN TA 2008			ALOKASI JAM TERBANG TA.2008			
		KUAT RIIL	SIR	SAS SIAP	OPS	LAT	DIK	JML
A.	PESPUR	SU-27/30	F-16 A/B	F-5 E/F	MK-53	HAWK-109/209		
	Jumlah	68	51	20	1194:00	10486:00		11680:00
B.	PESANG	C-130	B-737	F-28/27	C-212	CN-235		
	Jumlah	50	31	20	7485:30	6198:30		13684:00
C.	PES HELI	SA-330	NAS-332	S-58T	EC-120 B	B-47 G		
	Jumlah	39	35	23	2190:00	4380:00	1000:00	7570:00
D.	PES LATU	T-34C	AS-202	KT-1 B	T-41 D/R-172K			
	Jumlah	57	46	31		4697:00	9828:00	9828:00
<b>TOTAL</b>		214	163	94	10869:30	25761:30	25761:30	47.459:00

Dalam kurun waktu tahun 2005-2009 kesiapan pesawat maupun alokasi jam terbang terjadi penurunan. Penurunan yang cukup besar terjadi pada TA 2009 sebesar 21,5%.

#### 4.3.4. Kesiapan Radar Hanud.

TA	Jumlah Radar	Jam Ops
2006	17	88.266 Jam
2007	17	80.754 Jam
2008	17	76.646 Jam
2009	17	80.769 Jam

Sumber : Sasbinpuan TNI AU 2005-2009

Operasional Radar hanud TNI AU dari tahun 2005 sampai dengan 2009 terjadi trend yang menurun terutama dari tahun 2006 sampai dengan 2008 berkisar diantara 6% dan mengalami kenaikan kembali pada TA 2009.

4.4. **Analisis.** Seberapa siapkah Alutsista TNI AU untuk menghadapi kemungkinan ancaman dari perubahan geopolitik kawasan Indonesia? Pertanyaan ini mengemuka karena sebagai bagian integral dari TNI, TNI AU bertugas secara dini menghadapi ancaman agresor yang datang dari luar dan menghancurkannya sedini mungkin dan sejauh mungkin diluar wilayah kedaulatan. Kemampuan tersebut tampak pada Palagan Pelibatan TNI AU dalam Operasi Militer Perang yang membagi menjadi tiga yaitu<sup>61</sup> :

- a. **Palagan Lapis III.** Palagan lapis II terletak pada wilayah Internasional di luar ZEE, diproyeksikan keluar sampai posisi lawan yang ditujukan untuk mengancam kedaulatan negara.
- b. **Palagan Lapis III.** Palagan lapis II berada diluar laut teritorial, membentang diatas kawasan ZEE, setiap ancaman yang akan memasuki wilayah nasional akan dihancurkan dengan pesawat tempur.
- c. **Palagan Lapis I.** Palagan lapis I berada diatas daratan dan laut teritorial (dari garis batas wilayah laut teritorial 12 NM kedalam). Lawan yang berhasil melewati Palagan Lapis III dan II akan dihancurkan dengan

<sup>61</sup> Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa, Mabasau 2007 hal 35

Pesawat tempur, Peluru Kendali Jarak Pendek serta baterai-baterai penangkis serangan udara.

Segala kemampuan dalam setiap Palagan tersebut membutuhkan alat untuk mendeteksi dan menghancurkan secara dini setiap ancaman berupa Pesawat Tempur dan Radar Hanud yang tangguh. Kekuatan Udara yang tangguh tersebut dibangun dengan merespon setiap perubahan Geopolitik kawasan Asia Tenggara oleh Pemerintah Indonesia. Perubahan geopolitik tersebut dapat saja mengancam kepentingan nasional Indonesia, untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan kekuatan TNI AU yang diproyeksikan akan mampu menghadapi perubahan geopolitik tersebut.

#### 4.4.1. Geopolitik Kawasan.

Sesuai dengan artinya, Geopolitik dimaknai sebagai ilmu bumi politik yang mencakup tidak hanya membahas masalah geografis sebuah negara dan kawasan tetapi juga perkembangan politik yang mengikuti sebuah kawasan tersebut. Perkembangan politik sebuah kawasan juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya kebijakan pertahanan negara-negara tersebut. Jika kestabilan politik sebuah kawasan relatif tenang dan damai maka dapat diduga tidak akan terjadi belanja pertahanan yang berlebihan dikawasan tersebut. Demikian juga dengan kawasan Asia Tenggara tempat negara Indonesia tinggal. Setelah sekian lama terjaga kestabilan kawasannya dengan kehadiran ASEAN, kawasan ini sempat terlihat menggeliat setelah terjadinya beberapa ketegangan antar negara anggota ASEAN mengenai klaim tumpang tindih daerah perbatasan. Perseteruan muncul antara Malaysia dan Indonesia mengenai perairan Ambalat, klaim tumpang tindih di kepulauan Spratly yang kaya gas alam antara Malaysia, Brunei, Vietnam, Philipina dan China. Perebutan Sumber daya alam menjadi faktor penting terjadinya konflik saat ini<sup>62</sup> ( Philippe Le Billon 2005). Menurut Philippe, “setelah berakhirnya perang dingin perselisihan antar negara tentang sumberdaya alam menjadi motif utama timbulnya beberapa konflik dan perang.

---

<sup>62</sup> Phippe Le Billon, *The Geopolitical Economy of .Resource Wars*. London 2005

Perang invasi Irak di Kuwait serta perebutan tambang intan di beberapa negara Afrika menjadi contoh nyata konflik yang terjadi karena perebutan sumber daya alam". Demikian juga perselisihan wilayah antar negara di Asia Tenggara banyak terjadi pada wilayah yang diyakini memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang besar. Jika perselisihan antar negara mulai muncul, maka salah satu instrument penting yang biasanya dihadapkan oleh negara yang sedang berselisih adalah kehadiran instrument militer disamping instrument diplomasi.

Kehadiran instrument militer ini sejalan dengan teori Realisme HI seperti yang ditulis oleh Morgenthau dimana menurut beliau sebuah negara untuk mendapatkan kebijakan keamanan Nasional yang kuat maka negara tersebut harus memiliki Angkatan Bersenjata agar dapat hidup berdampingan dan berhadapan satu dengan yang lainnya tanpa terintimidasi atau takluk. Untuk menjamin agar tidak ada negara berkekuatan besar berhasil mencapai posisi hegemoni berdasarkan intimidasi atau penggunaan kekuatan yang sewenang-wenang, maka penting bagi satu negara untuk membangun dan memelihara keseimbangan kekuatan militernya<sup>63</sup>. Konsep ini yang digunakan oleh negara kawasan Asia Tenggara ketika melihat keseimbangan keamanan kawasannya mulai terganggu terutama setelah berakhirnya perang dingin.

Pasca berakhirnya perang dingin, dunia saat ini tidak serta merta terbebas dari ancaman terjadinya konflik militer antar negara. Berakhirnya perang dingin membuat dunia menjadi *in an Era of Uncertainty* suatu era yang dahulu dwi polar sekarang menjadi multi polar dengan keamanan yang tidak menentu<sup>64</sup>. Ancaman keamanan dunia yang sebelumnya hanya diakibatkan oleh interaksi dua kutub, tetapi sekarang muncul banyak kekuatan dunia baru menyaingi Amerika Serikat. Kekuatan dunia baru tersebut diantaranya China yang tingkat pertumbuhan perekonomiannya yang sangat tinggi dan diikuti dengan pembangunan Angkatan Bersenjata yang sangat besar. Persaingan antara China dan Amerika Serikat juga berlangsung di kawasan Asia Tenggara baik dibidang ekonomi maupun

---

<sup>63</sup> Opcit, Robert Jackson & Georg Sorensen

<sup>64</sup> Opcit Ashley J. Tellis and Michael Wills, Executive Summary military Modernization in an Era of Uncertainty

persaingan dalam bentuk perebutan sumber energi minyak dan gas. Disamping persaingan antara kedua negara besar tersebut, sesama negara ASEAN juga terlibat dalam perebutan sumber daya alam yang dikemas dalam konflik perbatasan baik darat maupun laut. Persaingan sesama negara kawasan ditambah oleh masuknya China dalam konflik tersebut membuat negara-negara kawasan membangun kekuatan bersenjata termasuk kekuatan udaranya menjadi lebih kuat. Pembelanjaan anggaran Pertahanan China yang sedemikian besar telah mendorong negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk ikut memperbesar anggaran pertahanannya<sup>65</sup>. Kekawatiran negara-negara kawasan asia tenggara terhadap perkembangan pembangunan kekuatan China disebabkan karena claim teritorial negara tersebut yang meluas keselatan daratan China. Sejak tahun 1998, China mempunyai 12 perselisihan perbatasan dengan 6 negara tetangganya termasuk klaim ZEE diperairan yang kaya akan minyak dan gas Bumi dilaut China Selatan<sup>66</sup>. Kepentingan China terhadap keamanan laut China Selatan dan perairan Asia Tenggara tidak hanya karena potensi sumber daya alamnya semata, tetapi China juga melihat kawasan ini sebagai urat nadi perekonomian nasionalnya. *Resource Needs as a Factor in China's Strategy* terutama kebutuhan akan batubara dan minyak bumi yang didatangkan dari kawasan teluk ataupun Afrika yang mencakup lebih dari 80% import minyak mentahnya melewati selat Malaka<sup>67</sup>. Begitu pentingnya perairan di laut China selatan bagi perekonomian China membuat negara tersebut secara aktif menghadirkan kekuatan laut dan udara dikawasan tersebut. Kehadiran militer China yang kuat pada kawasan Asia tenggara inilah yang direspon oleh negara kawasan untuk memperkuat Angkatan bersenjata terutama Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Australia sebagai salah satu negara besar yang juga mempunyai kepentingan dengan kestabilan Asia Tenggara telah merespon tingkat kehadiran militer China tersebut dengan membangun Angkatan Laut dan Udara yang kuat serta meningkatkan kerjasama regional dengan negara-negara ASEAN. Bagi

---

<sup>65</sup> Cordesman & Kleiber: *The Asian Conventional Military Balance 2006*, CSIS Washington hal 6

<sup>66</sup> *Military Power of the People's Republic of China 2009*, Departement Of Defense, United State of America, hal 17

<sup>67</sup> Ibid.

Australia, kekuatan maritim menjadi element penting untuk pelaksanaan strategy militernya. Pembangunan kekuatan laut dan udara Australia yang bersifat ofensif ditandai dengan kehadiran kapal Selam jenis baru Collins class<sup>68</sup> dan pesawat tempur F-18 Super Hornet untuk menggantikan peran pembom serang F-111<sup>69</sup>. Itu semua untuk mendukung kepentingan strategis Australia yang berisi keamanan nasional Australia dan Keamanan para negara tetangganya seperti Indonesia<sup>70</sup>. Walaupun saat ini Australia sangat berkepentingan dengan keamanan di Indonesia, tetapi sejarah pernah mencatat bahwa Australia juga beberapa kali terlibat dalam ketegangan politik dengan Indonesia bahkan menjurus kekonflik militer.

Disamping Australia, negara-negara ASEAN juga membangun kemampuan pertahanan mereka terutama pada pembangunan angkatan Udara nya. Beberapa negara tersebut menyadari akan pentingnya memiliki kekuatan Udara (Air Power) untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Menurut Jendral Omar Bradley “*Air Power is an inherently strategic force*” Kekuatan Udara sangat penting untuk mencegah terjadinya perang, karena mampu untuk menghancurkan kekuatan potensialnya sekaligus untuk menghilangkan kemauaan musuh untuk berperang”<sup>71</sup>. Kemampuan dari Air power inilah yang dikembangkan dan dibangun oleh negara-negara ASEAN dalam kurun 2005-2009 seperti Singapura, Thailand, Malaysia dan Vietnam. Thailand menghadirkan kapal induk ringan kelas HTMS Chakri Naruebet yang dibangun bekerjasama dengan Spanyol<sup>72</sup>. Kapal induk ini mampu dilengkapi dengan pesawat tempur sekelas Harier dan digunakan sebagai kapal *command and control* operasi dukungan udara dalam operasi amphi. Singapura menghadirkan pesawat tempur modern A-4 Super Skyhawk, F-16, dan F-15 dan didukung dengan pesawat tanker KC-135 yang membuat angkatan udara Singapura mampu beroperasi pada area yang sangat luas. Disamping itu Singapura juga telah mengoperasikan UAF yang memungkinkan negara tersebut melaksanakan surveillance kedaerah-daerah rawan

<sup>68</sup> Sean Costello and Andrew Davies How to buy a submarine: Defining and building Australia’s future fleet Australiaan Strategic Policy Institute. 2009

<sup>69</sup> <http://www.raaf.gov.au/> 10 Juli 2010

<sup>70</sup> Defence White Paper 2009 , Australian Government Departement Of Defence Chapter 5

<sup>71</sup> Phillips S Mellinger, 10 Propositions Regarding Air Power, hal 8.

<sup>72</sup> <http://www.naval-technology.com/projects/chakrinaruebet/>

tanpa kehadiran personal militer Singapura secara langsung di daerah tersebut. Pembangunan kekuatan udara Singapura jelas melebihi kebutuhan keamanan negara tersebut, tetapi Singapura berpendapat bahwa ancaman agresor terhadap kepentingan nasional Singapura harus dihancurkan sedini mungkin dan sejauh mungkin dari wilayah kedaulatan Singapura. Hal itu hanya mungkin dilakukan oleh sebuah angkatan Udara yang kuat. Singapura menyadari pentingnya menggunakan Kekuatan Udara sebagai Instrument Nasional untuk mengamankan kepentingan nasional negara tersebut.

Malaysia dalam kurun waktu yang sama juga membangun angkatan udaranya dengan pesawat tempur modern seperti F-18, MIG-29, SU-30 dan menggelar kekuatan tersebut di daerah Kalimantan Utara yang menghadap laut China Selatan. Disamping kekuatan udara, Malaysia juga membangun kekuatan lautnya dimana sejak September 2009 telah digelar 2 kapal selam kelas *Scorpène* yang dibangun oleh perusahaan Perancis dan Spanyol. Kapal selam ini dipersenjatai dengan Blackshark wire-guided torpedoes and Exocet SM-39. Pembangunan kekuatan bersenjata Malaysia terutama persenjataan yang bersifat ofensif seperti kapal selam dan pesawat Tempur modern telah menunjukkan bahwa negara tersebut dapat sewaktu-waktu menggunakan Alutsistanya untuk ofensif jika kepentingan nasionalnya terganggu. Demikian juga dengan klaim teritorial Malaysia di Ambalat yang masih dipersengketakan dengan Indonesia dan Philipina, opsi penggelaran kekuatan militer tidak menutup kemungkinan akan digunakan oleh negara tersebut.

Philipina masih memfokuskan diri pada kestabilan politik negara tersebut dimana sebagian wilayah di Philipina selatan masih menjadi daerah konflik. Konflik yang berkepanjangan tersebut telah mengundang kehadiran aktor-aktor non state (terorisisme) sehingga dapat mempengaruhi keamanan kawasan.

Indonesia sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara pada kurun waktu yang sama masih banyak disibukan dengan proses berdemokrasi. Sejak jatuhnya era Presiden Soeharto maka peran legislatif mulai ditonjolkan untuk menghindari terjadinya pemimpin nasional yang otoriter. Peran Legislatif yang terlalu menonjol dalam hal mengontrol pemerintahan sering membuat program-program yang digulirkan oleh pemerintah mendapat tantangan dari kalangan DPR.

Kasus pengadaan pesawat tempur Sukhoi yang penyelesaiannya berlarut-larut, pengangkatan Panglima TNI Marsekal Joko Suyanto menjadi contoh kuatnya resistensi Parlemen terhadap Pemerintah walaupun Presiden telah dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Dalam era yang sama bangsa Indonesia masih membutuhkan peran OMSP terutama dalam penanggulangan bencana alam yang sering terjadi di tanah air.

Menurut Teori Kebijakan Keamanan Nasional dari Samuel P. Huntington sebuah negara hendaknya menyusun kebijakan Keamanan Nasionalnya dengan meningkatkan keamanan institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik bangsa terhadap berbagai ancaman negara lain<sup>73</sup>. Dari teori ini tampak bahwa kebijakan keamanan Nasional harus didasari juga dengan institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial yang kuat, karena tanpa itu semua tidak akan menghasilkan kebijakan keamanan nasional yang baik. Perkembangan ekonomi, sosial dan politik tanah air belum sepenuhnya bisa dikatakan kuat, sehingga berdampak terhadap kebijakan keamanan nasional dan berpengaruh langsung terhadap kebijakan pertahanan nasional. Hal itu tampak dari perubahan geopolitik kawasan yang telah berkembang sedemikian pesat yang diikuti dengan pembangunan kekuatan angkatan bersenjata masing-masing negara tidak terimbangi oleh kebijakan pertahanan Indonesia.

#### 4.4.2 Anggaran Pertahanan.

Pembelajaan anggaran pertahanan negara-negara ASEAN pada tahun kurun waktu 2005-2009 berdampak pada perubahan keseimbangan kawasan. Pengaruh pengembangan kekuatan China telah menjadi *security dilemma* bagi negara-negara ASEAN dengan cara meningkatkan kekuatan militernya yang berdampak negara-negara ASEAN lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa masih ada ketegangan di kawasan Asia Tenggara walaupun antar anggota ASEAN<sup>74</sup>. Pembangunan kekuatan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara diluar Indonesia mempersiapkan diri dengan deterrence power. Negara-negara tersebut

---

<sup>73</sup> Opcit , Samuel P.Huntington.

<sup>74</sup> Dr John Chipman , The MILITARY BALANCE 2008,Press Statement

ingin memperlihatkan kepada negara lain dengan cara memberi signal kuat bahwa mereka siap menjaga kepentingan nasionalnya dengan menggunakan kekuatan militer. Pembangunan kekuatan negara-negara Asia Tenggara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**PERBANDINGAN ANGGARAN dan JUMLAH PENDUDUK  
NEGARA-NEGARA ASEAN**

NEGARA	ANGGARAN	PDB	JUMLAH PDDK
Indonesia	US\$ 2,6 M (0,8% PDB)	US\$ 346 M	231.820.879
Singapura	US\$ 10,05 M (7,6% PDB)	US\$ 132 M	4.492.720
Malaysia	US\$ 3,08 M (2,2% PDB)	US\$ 143 M	24.385.136
Thailand	US\$ 2,2 M (1,9% PDB)	US\$ 207 M	64.631.502
Laos	US\$ 0,014 M (0,4% PDB)	US\$ 2,9 M	6.368.141
Vietnam	US\$ 3,4 M (6,3% PDB)	US\$ 61,1 M	84.402.576
Brunei	US\$ 0,36 M (6% PDB)	US\$ 6 M	0,37 JT
Philipina	US\$ 0,9 M (1,1% PDB)	US\$ 118 M	89.468.677
Myanmar	US\$ 6,2 M (6% PDB)	US\$ 75 M	46.986.558

Sumber : Postur Pertahanan Negara 2007

Dari tabel diatas tampak bahwa besaran anggaran pertahanan Indonesia masih tertinggal dari Singapura , Malaysia dan Vietnam dimana negara-negara tersebut dari segi jumlah penduduk dan luas wilayah jauh dibawah Indonesia. Dari prosentase dengan PDB, Indonesia hanya sedikit diatas Laos yang jumlah penduduknya 1/40 dari penduduk Indonesia.

Kebijakan pertahanan sebuah negara terlihat secara langsung dalam kebijakan anggaran pertahanan. Jumlah anggaran pertahanan Indonesia pada tahun 2006 meningkat cukup besar 22% dari anggaran 2005 diangka 28 Trilyun walaupun angka tersebut masih jauh dari angka Ideal kebutuhan pertahanan. Pada tahun 2007 anggaran tersebut meningkat kembali menjadi 32 Trilyun (17%). Besaran angka tersebut ternyata tidak beranjak naik secara signifikan di tahun 2008 dan 2009 bahkan pada tahun 2009 terjadi penurunan. Sedangkan dari tabel Dukungan Anggaran tahun 2005-2009 tampak bahwa anggaran pertahanan Indonesia rata-rata hanya terdukung 40,80% dari alokasi yang dibutuhkan dan 0,85% dari angka PDB. Jumlah anggaran pertahanan dibawah 1% dari PDB tersebut sangat sulit merealisasikan TNI yang profesional seperti yang

diamanatkan dalam UU N0 34 tahun 2004. Jumlah anggaran tersebut menunjukkan bahwa Indonesia kurang siap menyikapi perubahan geopolitik kawasan terutama dibidang pembangunan angkatan Bersenjata. Anggaran pertahanan tersebut sebenarnya masih jauh dari kebutuhan minimum apalagi ideal, sehingga anggaran yang dapat disalurkan bagi angkatan udara juga menjadi sangat minimum.

Akibat dari anggaran pertahanan yang kurang ideal tersebut berdampak pada anggaran yang diterima oleh TNI AU. Anggaran yang diterima TNI AU dari tahun 2005-2009 tidak pernah mencapai angka minimal apalagi ideal. Rata-rata anggaran yang diterima oleh TNI AU berkisar antara 13,6% dari kebutuhan Ideal atau 37,2% dari kebutuhan minimal. Anggaran tersebut sebagian besar terserap dipos anggaran belanja pegawai, barang dan jasa, dimana pada kedua pos anggaran tersebut tidak ada anggaran untuk pengadaan alutsista udara baru. Bahkan pada TA 2009, anggaran yang diterima menurun dari 32,2% menjadi 29,5% dari kebutuhan minimal. Besaran anggaran ini jelas tidak memberi peluang untuk memperthankan kesiapan operasional alutsista udara apalagi membangun kekuatan alutsista udara yang baru. Berkurangnya dukungan anggaran berakibat langsung terhadap kesiapan alutsista udara dimana kesiapan alutsista TNI AU terus menurun yang tampak pada alokasi jam terbang mulai tahun 2006 sebesar 60.146 jam terbang dan terakhir 2009 sebesar 47.459 jam terbang terjadi penurunan sebesar 21%. Pada periode ini juga terjadi beberapa kecelakaan pesawat TNI AU yang menimbulkan banyak korban jiwa yaitu tanggal 6 April 2009 A-2703 di Bandung dan tanggal 20 Mei 2009 A-1325 di Madiun. Apakah besaran anggaran yang kurang dapat mempengaruhi tingkat accident pesawat TNI AU, menurut penulis suatu hal yang perlu mendapat penelitian lebih lanjut. Berkurangnya jumlah dan tingkat kesiapan alutsista TNI AU tentu saja berdampak langsung terhadap kemampuan TNI AU dalam menghadapi kemungkinan ancaman sebagai akibat perubahan geopolitik kawasan.

## 4.4.3 Alutsista.

**PERBANDINGAN KEKUATAN UDARA  
NEGARA KAWASAN**

Negara	Jumlah pesawat	Radar	Jumlah pers
Indonesia	<b>96 (45%Combat )</b>	<b>17 AD</b>	<b>24.000</b>
Malaysia	198 (74 combat )		15.000
Singapura	231 (104 Combat)	2 mobile	13.500
Thailand	254 (165 combat)		46.000
Vietnam	366 (219 combat)		30.000
China	1.617 combat		300.000
Australia	256 (109 combat )	8 OTH/4 TAC	14.056
Philipina	30 combat		16.000

Sumber : Military Balance 2010

Jumlah kesiapan alut sista udara sering dijadikan pedoman bagi kesiapan operasional sebuah angkatan Udara. Jika dicermati dari perbandingan kekuatan udara kawasan, maka kekuatan TNI AU sangat jauh tingkat kesiapan operasionalnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Indonesia hanya sedikit diatas Philipina dalam hal kesiapan pesawat. Sasaran kesiapan pesawat selalu turun dari 129 pada tahun 2006 menjadi hanya 94 pada tahun 2009. Jika dicermati lebih jauh maka dari angka kesiapan tersebut 33% untuk pesawat latih sedangkan untuk tempur dan transport masing-masing hanya 21% Sedangkan Helly 24%. Untuk kesiapan operasional Radar turun 8,4 % dari kesiapan 2006 ke 2009. Turunnya kesiapan alut sista tersebut mempengaruhi kemampuan TNI AU dalam melaksanakan tugas OMP dan OMSP. Kemampuan *Control of The Air, Air Strike, Air Support* dan Kemampuan Eksploitasi Informasi tidak akan terwujud dengan kondisi alutsista yang terbatas dan kondisi ini merupakan kelemahan yang mendasar dari pertahanan Indonesia. Menurut teori air power yang menyebutkan bahwa Air Power (Kekuatan Udara) dapat digunakan sebagai salah satu Instrument dalam pencapaian kepentingan Nasional Suatu Negara akan sulit dilakukan oleh TNI AU jika pembangunan kekuatannya masih seperti periode ini. Sebagai negara terbesar dikawasan Asia Tenggara dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar, maka sudah sewajarnya Indonesia memainkan

peran yang dominan dalam hubungan antar bangsa dikawasan ini<sup>75</sup>. Untuk negara seluas Indonesia dengan segala kekayaan alam yang harus dijaga, maka pembangunan kekuatan udara mutlak harus seimbang dengan pembangunan kekuatan matra lainnya terutama dihadapkan dengan perkembangan kekuatan udara negara-negara kawasan yang telah sedemikian pesat. Pembangunan kekuatan udara harus dalam bingkai strategy pembangunan pertahanan Indonesia yang memperhatikan faktor Geografi.

---

<sup>75</sup> Bantarto Bandoro, opcit GEOGRAPHY, NATIONAL POWER, AND STRATEGY  
<http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1992/BRI.htm>

## BAB 5

### **KESIMPULAN, dan SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan.**

Dari data yang dianalisa dengan menggunakan teori Air Power terutama tentang teori Membangun Kekuatan Udara suatu Perspektif Geopolitik, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan kekuatan TNI AU selama periode tahun 2005-2009 tidak sesuai dengan perkembangan geopolitik Indonesia dan kawasan. Selama kurun waktu tersebut TNI AU tidak mendapat anggaran yang memadai untuk mempertahankan kesiapan operasional Alutsistanya. Kesiapan Alutsista TNI AU selama periode waktu tersebut tidak akan mampu menghadapi kemungkinan ancaman yang timbul dari perubahan geopolitik kawasan karena negara-negara kawasan telah membelanjakan anggaran pertahanan yang cukup besar untuk memperkuat persenjataan Angkatan Bersenjata.

Hasil data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis menunjukkan bahwa tingkat kesiapan operasional TNI AU selalu menurun mulai tahun 2005-2009, suatu pertanda akan sangat berat tugas TNI AU dimasa yang akan datang dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mengamankan negara Indonesia.

#### **5.2. Saran.**

Dari hasil penelitian dan analisa tentang pembangunan kekuatan TNI AU dalam menghadapi perubahan geopolitik kawasan penulis menyarankan :

- Pembangunan Postur TNI AU dimasa depan harus berani menghilangkan stigma masa lalu dimana TNI AU dianggap sebagai salah satu Angkatan yang beraliansi dengan sebuah partai Komunis. Pembangunan Postur TNI AU

harus dilihat sebagai kebutuhan negara Indonesia untuk memperkuat salah satu elemen Nasionalnya.

- Untuk lebih mendapat gambaran yang lebih luas tentang kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan kekuatan TNI AU, penulis menyarankan diadakan penelitian serupa dengan mengambil kurun waktu 5 tahun sebelumnya. Penulis berasumsi bahwa pembangunan kekuatan TNI masih berorientasi pada salah satu matra, belum memperhatikan geografis Indonesia. Hal ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut.
- Pembangunan Kekuatan TNI kedepan hendaknya selalu mempertimbangkan perubahan geopolitik kawasan terutama negara-negara yang mempunyai permasalahan perbatasan dengan Indonesia. Perubahan tersebut termasuk dibidang anggaran militer terutama belanja untuk pembangunan militer negara bersangkutan.
- Pemerintah hendaknya mulai mempertimbangkan pengalokasian anggaran pertahanan diangka 3% PDB dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Penulis berasumsi bahwa pemberdayaan industri strategis dalam negeri juga berdampak kepada kegiatan ekonomi nasional. Hal lebih lanjut masih perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ashley J. Tellis and Michael Wills, Executive Summary military modernization in an Era of Uncertainty
- Cordesman & Kleiber: The Asian Conventional Military Balance 2006, CSIS Washington
- Arifin, Ashley J. Tellis and Michael Wills , Military Modernization in Asia strategic asia 2005–06 Washington
- MT Sipil Militer Pasca Reformasi. Reformasi TNI Perspektif Baru Hubungan Sipil Militer di Indonesia. LP3ES .
- Colin Rymer wing comander, Keajaiban kekuatan Udara, Kumpulan naskah para ahli kekuatan Udara, Kedutaan Australia 2003.
- Daniel Moran, Imagining Armagedon: Air Power, Strategic Theory and the History of War, oxford.
- Dino Patti Djalal DR, HARUS BISA Seni Memimpin ala SBY, R&W Jakarta 2008.
- Garden Timothy, Air power theory and practice, Strategy in the Contemporary World, Oxford.
- Francis P. Sempa, Geopolitics from the Cold War to the 21<sup>st</sup> Century. Military Power of the People's Republic of China 2009 , Departement Of Defense , United State of America,
- John Chipman Dr, The MILITARY BALANCE 2008, Press Statement Defence White Paper 2009 , Australian Government Departement Of Defence
- Phillips S Mellinger, 10 Propositions Regarding Air Power,
- Riant Nugroho Dr, Public Policy, Pt Elex Media Komputindo.
- Phiiippe Le Billon, The Geopolitical Economy of .Resource Wars. London 2005
- Tony Mason Air Vice Marshal, Air Power, Kedutaan Australia 2003.
- Robert Jackson & Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional.

Samuel P.Huntington.Prajurit dan Negara (Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil) Pt Grasindo.

Sean Costello and Andrew Davies How to buy a submarine: Defining and building Australia's future fleet Australiaan Strategic Policy Institute. 2009

Shekhar Adhikari, Guilio Douhet, Theory of Air Power, Modern Strategic Thought to Nuclear warfare .

Sayidiman Suryohadiprojo Letjen TNI (Pur), Si Vis Pacem Para Bellum, Gramedia Pustaka jakarta 2005.

Ulber Silalahi, Metoda Penelitian Sosial, Unpar Press 2006.

### **Jurnal.**

Bandaro Bantarto, National Power and defence Policy, Jakarta Maret 2010.

Bantarto Bandoro, Security Dilemma, Jakarta 2010

Bantarto Bandoro, National Power in The Context of State's Geopolitics, Jakarta 2010

Banyu Perwita, Regional Strategy Study Jakarta 2 September 2009.

Banyu Perwita, Three Concepts: Geography, Geopolitics and Geostrategy, Jakarta September 2009.

Koesnadi K (Marsda Pur) , Kepentingan Nasional, Jakarta Oktober 2009.

### **Piranti Lunak/Peraturan.**

UU no 34 tahun 2004 tentang TNI.

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008.

Buku Terminologi Angkatan Udara tahun 2002 bidang Logistik Skep Kasau No: Skep/116/IX/2002.

Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa , Kep KASAU no Kep/3/IV/200t tanggal 9 April 2007.

Strategic Policy, Australia Maritime Doctrine.

Australian Maritime Doctrine, RAN Doctrine 2000 chapter IV

Buku SASBINPUAN TNI AU 2006-2009

### Surat Kabar dan Internet.

1. <http://www.Kompas.com>, Jumat 4 Juli 2003.
2. Hasjim Djalal: Kekayaan Laut Banyak Dicuri Karena Tidak Dijaga  
/http://www.kapanlagi.com/h/0000204371.html.
3. Aksi Pencurian Ikan, RI Rugi Rp30T Pertahun  
/http://www.pelita.or.id/baca.php?id=42324
4. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0212/19/int3.htm> 01 Pebruari 2010.
5. <http://www1.voanews.com/indonesian/news/a-32-2010-02-09-voa13-85849282.html> 01 Maret 2010.
6. [http:// en.wikipedia.org/wiki/geopolitik](http://en.wikipedia.org/wiki/geopolitik) 12 Pebruari 2010.
7. [http:// en.wikipedia.org/wiki/geopolitik\\_friedrich\\_Ratzel](http://en.wikipedia.org/wiki/geopolitik_friedrich_Ratzel) 12 Pebruari 2010.
8. <http://www.antaraneews.com/berita/1261908405/pelanggaran-wilayah-udara-indonesia>.
9. <http://www.tempointeraktif.com/hg/wirusaha/2009/06/01/brk,20090601-179106,id.html> 10 Nop 2009.
10. <http://berita.liputan6.com/luarnegeri/201003/266607/Singapura.Cemas.Keamanan.Selat.Malaka> .
11. [Htp/buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=4](http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=4) tgl 14 Sept 2009.
12. <http://www.depkominfo.go.id/berita/berita-utama-berita/ksau-prihatin-atas-jatuhnya-pesawat-ov-10-bronco-di-malang/> 20 Agustus 2009.
13. <http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/2003/06/23/LU/mbm.20030623.LU88601.id.html> 10 Oktober 2009
14. Kabinet Indonesia bersatu/  
<http://www.presidenri.go.id/index.php/statik/kabinet.html>
15. [http:// en.wikipedia.org/wiki/geopolitik](http://en.wikipedia.org/wiki/geopolitik) 12 Pebruari 2010
16. [http:// en.wikipedia.org/wiki/geopolitik\\_friedrich\\_Ratzel](http://en.wikipedia.org/wiki/geopolitik_friedrich_Ratzel) 12 Pebruari 2010
17. <http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2010/01/25/1317.htm> 01 Maret 2010
18. Deklarasi ASEAN ayat 1 dan 2 <http://www.aseansec.org/> 0111091700.
19. [http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif) 01 Maret 2009.
20. <http://www.partai.info/pemilu2004/> 30 Juni 2010.

21. <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/d/djoko-soeyanto/index.shtml>  
10 Mei 2010.
22. Wahyu Susilo Masalah Buruh Migran Indonesia Dalam Sidang Dewan HAM ,  
<http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=2&artid=17> 1 Juli 2010
23. <http://www.aseannewsnetwork.com/singapore/history-indonesian.html>.
24. <http://www.kontan.co.id/index.php/internasional/news/20903/Ekonom> 2009  
Perekonomian Singapura Mengkerut.
25. <http://www.forum-politisi.org/special/article.php?id=555>
26. <http://www.aseansec.org/> 12 Januari 2010
27. [http://www.tvone.co.id/berita/view/27542/2009/11/14/china\\_akan\\_investasi\\_dibidang\\_infrastruktur\\_listrik/](http://www.tvone.co.id/berita/view/27542/2009/11/14/china_akan_investasi_dibidang_infrastruktur_listrik/) 07 Nop 2009.
28. <http://www.indoflyer.net/content.asp?contentid=29781> 17 Nop 2009.
29. [http://www.navy.gov.au/Publication:Australian\\_Maritime\\_Doctrine](http://www.navy.gov.au/Publication:Australian_Maritime_Doctrine).
30. [http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2009/02/23/brk,20090223-161638\\_id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2009/02/23/brk,20090223-161638_id.html) 03 Sept 2009.
31. Sean Costello and Andrew Davies Australian strategic Policy Institute, How to buy a submarine Defining and building Australia's future fleet, Oktober 2009